

**PENGARUH GERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN
TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI MESIR**



PERPUSTAKAAN PERKAMPUSAN HASANUDDIN	
Tgl. Terima	28-07-08
Asal Dari	Suspul
Banyak	1 eksemplar
Harga	Rp. 461
No. Inventaris	
No. Klasifikasi	

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana
pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*

**WISDA YANDHA BISMAN
E13104719-1**

**PROGRAM REGULER SORE
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH GERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN
TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI MESIR

NAMA : WISDA YANDHA BISMAN

NIM : E 131 04 719-1

JURUSAN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, Juni 2008

Mengetahui,

Pembimbing I,



Dr. Adi Suryadi Culla, M.Si
NIP. 131 992 468

Pembimbing II,



Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag
NIP. 131 792 032

Mengesahkan,

Ketua Program S1
Reguler Sore



Drs. H. Nurdin Nara, M.Si
NIP. 131 866 084

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Judul Skripsi : PENGARUH GERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN
TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI MESIR

Nama : Wisda Yandha Bisman

NIM : E13104719-1

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jumat 27 Juni 2008

TIM EVALUASI

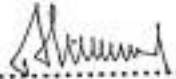
Ketua : Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag

Sekretaris : Agussalim, S.Ip, MIRAP

Anggota : 1. Drs. Sabri Dahlan

2. Drs. Aspiannor Masrie

3. Seniwati, S.Sos, M. Hum


.....
.....
.....
.....



KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas segala Rahmat dan Hidayahnyalah yang senantiasa tercurah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis hanturkan Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak.

Tulisan ini merupakan bentuk dari upaya penulis dalam memenuhi syarat untuk meraih gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari harapan mengingat segala bentuk keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki. Sehingga penulis menerima dengan besar hati segala kritikan dan saran demi pencapaian kesempurnaan. Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, akhirnya kepada Allah jualah, penulis memohon dan mengucapkan syukur semoga kita semua mendapat berkah kehidupan dan selalu dalam lindungannya. Amien.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **H. Bisman** dan Ibunda **Hj. Hadrah** atas limpahan kasih sayang serta panjatan doa yang tak kenal usai, juga buat saudara-

saudaraku tersayang, **Peni Mulyani Bisman, Aswar Sutami Bisman, M. AdluHadiman, Anisya Putri Bisman.**

Sebagai bentuk apresiasi penulis yang mendalam, maka perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan FISIP Universitas Hasanuddin beserta staff dan karyawan.
2. Bapak Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS **Drs. Patrice Lumumba, MA.**
3. Bapak Sekertaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS **Drs. Aspiannor Masrie**, atas segala masukan dan dorongan kepada penulis.
4. Ketua Program Reguler Sore FISIP UNHAS **Drs. Nurdin Nara, M.Si** beserta segenap karyawan administratif yang banyak membantu penulis sejak terdaftar sebagai mahasiswa.
5. Konsultan I, **Dr.Adi Suryadi Culla, M.Si**, dan Konsultan II, **Prof.Dr.Basir Syam, M.Ag**, terima kasih telah meluangkan waktunya, serta memberikan masukan dan dorongan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Staff Edukatif dan Akademik FISIP UNHAS RESO yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin. **Prof.Dr.J. Salusu, M.A., Prof. Dr. Paembonan, M.A., Drs. Patrice Lumumunba, M.A., Dr.Adi Suryadi Culla, M.Si, Drs. H. Darwis, M.A., Drs. Sabri Dahlan, M. Nasir Badu,**

S.Ip, M.A, Drs. Husain Abdullah, Drs, Munjin Syafik, Seniwati, S.Sos, M.Hum, Drs. Aspianoor Masrie, Ishak Rahman, S.Ip., dan Agus Salim S.Ip, MIRAP.

7. Teman-teman se-HI UNHAS RESO 04, special to **Ikha** (*I don't know how to describe u but you're really the best*), **Mega** (yang slalu menemaniku disaat sedih dan hampir putus asa), **Odha** (Salut atas semangatmu, *you're inspired me*), **Roni**, **EF** (makasih sudah antar-antar ka kesana kemari), **Ipul**, **Janriz**, **Muqni**, (Kapan nyusul?? Semangat yah!!) dan teman-teman angkatanku Thanx atas dukungannya, teman-teman di UIN Uni, **Amel**, dan **Lilis** (thanx dah bantuin nyari bahan), buat sahabat-sahabatku **Qia**, **Wilda**, n **Srie** (Kangen nih kapan ngumpul lagi??),
8. Seluruh teman-teman SOFTBALL-BASEBALL UH tempatku melepas jenuh, dan kepenataan, **K'Wandi** (paling narsis sedunia), **Emin**, **Ruly**, **Opie**, **EF**, **k'Iqra**, **k'Miank**, **Vini**, **Rinna** (makasih buat dukungannya) dan ade-ade juniorku rajin-rajin latihan yah.
9. Teman-Teman **SIKATOANG** semoga kita tetap solid hingga akhir hayat.
10. Untuk **Riri Darnady** makasih yang tak terhingga, atas doa, dukungan, motivasi, kesabaran, dan kesetiannya. *You're the best I ever had, there aren't reasons we just know.*
11. Seluruh teman-teman yang tak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, yang telah banyak memberi warna. *We had each other, Thank's for all.*

ABSTRAKSI

Wisda Yandha Bisman, E 131 04 719-1, Pengaruh Gerakan Ikhwanul Muslimin terhadap Politik Luar Negeri Mesir, di bawah bimbingan Dr. Adi Suryadi Culla, M.Si, selaku Konsultan I dan Prof. Dr. M. Basir Syam, M.Ag, selaku Konsultan II, pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana situasi politik di Mesir, dan sejauh mana eksistensi gerakan Ikhwanul Muslimin dalam mempengaruhi politik luar negeri di Mesir. Fokus Penelitian adalah melihat seberapa besar pengaruh yang dapat ditimbulkan dari adanya gerakan ini, yang dapat berdampak dalam kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil pada setiap masa kepemimpinan di Mesir, hingga saat ini yaitu pada masa kepemimpinan Hosni Mubarak.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini didasarkan pada tipe penelitian preskriptif yang merupakan gabungan dari eksplanatif dan prediktif. Analisis eksplanatif merupakan penggambaran tentang sistem politik luar negeri di Mesir, dan memprediksi bagaimana gerakan ini mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri di Mesir. Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah telaah pustaka dengan menggunakan jenis data sekunder yang berasal dari berbagai literatur sebagai penunjang dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penelitian ini, digunakan pula analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta dan data yang diperoleh.

Bercermin dari kepemimpinan sebelumnya, Hosni Mubarak berusaha merangkul gerakan Ikhwanul Muslimin dalam perpolitikan di Mesir, hal ini di sebabkan karena pemimpin-pemimpin sebelumnya mati terbunuh oleh gerakan islam radikal, melihat perbedaan ideologi antara gerakan ini dengan pemerintah sangat mencolok dan kebijakan yang diambil tidak menguntungkan bagi gerakan-gerakan islam yang ada di Mesir, hal ini pulalah yang melahirkan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Gerakan ini tumbuh dan berkembang menjadi gerakan yang besar hingga bergabung dalam partai oposisi, dan mampu menduduki kursi di Parlemen Mesir. Upaya Pemerintah Hosni Mubarak yang tadinya hanya mengizinkan gerakan ini tetap melakukan aktivitasnya di Mesir sangat berbeda dengan sikap para pemimpin sebelumnya, seperti Anwar Sadat dan Gamal Abdul Naser. Namun hal itu justru menjadi ancaman bagi Hosni Mubarak lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan apalagi pada masa ini isu-isu mengenai konflik Arab-Israel terus berkembang. Gerakan Ikhwanul Muslimin yang berada di Parlemen juga sangat menghormati Hosni Mubarak karena mereka tidak ingin beliau mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan sesama anggotanya yang berada di luar lingkungan politik, tujuannya agar gerakan ini tetap eksis dan dapat menegakkan nilai-nilai agama di tengah perkembangan sekuler masyarakat Mesir.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Aktor Non Negara.....	15
B. Konsep Politik Luar Negeri	21
C. Konsep Pengaruh	27
BAB III GAMBARAN UMUM GERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN DAN POLITIK LUAR NEGERI MESIR	
A. PROFIL IKHWANUL MUSLIMIN	
1.1 Latar belakang Gerakan Ikhwanul Muslimin	33
1.2 Aktor Gerakan Ikhwanul Muslimin	37

1.3 Tujuan Gerakan Ikhwanul Muslimin	44
B. POLITIK LUAR NEGERI MESIR	
1.1 Sifat Politik Luar Negeri Mesir	48
1.2 Substansi Politik Luar Negeri Mesir	58
BAB IV ANALISA HASIL PEMBAHASAN	
A. Hubungan Antara Gerakan Ikhwanul Muslimin Dengan Pemerintah Mesir	65
B. Pengaruh Gerakan Ikhwanul Muslimin Terhadap Polugri Mesir	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mesir merupakan salah satu negara yang terkemuka di kawasan Timur Tengah dengan penduduknya yang mayoritas muslim. Secara geografis Mesir termasuk dalam wilayah regional Asia Barat dan bagian dari Afrika Utara karena sebagian besar wilayahnya berada dalam Benua Afrika.

Secara historis, Mesir mempunyai makna tersendiri sebagai bagian dari peradaban Islam masa silam yang begitu gemilang. Kultur masyarakat negara itu tidak bisa lepas dari kultur induk masyarakat Timur Tengah yang kental sekali dengan tradisi yang berbasis nilai-nilai Islam. Hal ini wajar karena Islam sendiri turun di Timur Tengah dan Mesir adalah kawasan yang bersebelahan dengan Arab Saudi, tempat kelahiran Islam. Sejak masa *al-Khulafa al-Rasyidin*, Mesir pun telah berada dalam wilayah kekuasaan Islam, sehingga islamisasi masyarakat Mesir telah berlangsung lama.¹

Fakta mayoritas ini tidak serta merta menjadikan Islam sebagai ideologi utama dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan masyarakat di Mesir modern. Sebaliknya, penguasa negara itu lebih condong pada pemerintahan sekuler sebagaimana yang telah lebih dahulu dipraktekkan di Barat.

¹Anjar Nugroho, *Gagalnya Islam Politik*, <http://id.wordpress.com/tag/politik-islam/>, di akses tgl 25 Februari 2008

Fakta ini tentu menjadi sebuah ironi; mayoritas penduduknya Muslim, tetapi secara politik terdapat marjinalisasi yang cukup sistemik atas ajaran yang diyakini oleh penduduk mayoritas.

Mesir telah bertarung menghadapi kebangkitan Islam yang menentang keras negara dan elite penguasa. Kebangkitan Islam kontemporer ("fundamentalisme Islam" atau "Islamis" atau "Islam politik"), ditilik dari asal usul dan menifestasinya, memiliki akar yang kuat dalam pengalaman Mesir. Pengalaman ini mempunyai dampak regional dan internasional pada Islam transnasional juga Barat. Ikhwanul Muslimin telah menawarkan model-model ideologi dan organisasi bagi pertumbuhan dan perkembangan gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia Muslim, dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara.²

Sebagian besar karakter dan politik Mesir kontemporer dipengaruhi oleh revolusi 1952 dan pemerintahan Gamal Abdel Nasser dari tahun 1952 sampai 1971. Nasser mendefinisikan kembali hakekat nasionalisme Mesir dan mempromosikan nasionalisme dan sosialisme Arab baik di dalam maupun di luar negeri. Dia menciptakan suatu negara "keamanan" yang otoriter dan memproyeksikan dirinya sebagai seorang pemimpin regional dan dunia.³

Meskipun Gamal Abdel Nasser dan revolusi pada awalnya mendapatkan dukungan dari Ikhwanul Muslimin, usai revolusi, Ikhwan menentangnya setelah terbukti bahwa Gamal Abdel Nasser tidak berniat mendirikan sebuah negara

² Mohammad, Syed, *Moralitas Politik Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003, hal. 21

³ *Op.cit*

Islam, tetapi mempromosikan nasionalisme dan sosialisme Arab sekular. Ketika hubungan dengan Ikhwan memburuk, pemerintah dan Ikhwan terlibat dalam konflik yang dalam beberapa kesempatan meledak menjadi tindak kekerasan. Akhirnya, pada tahun 1966, Gamal Abdul Nasser bertindak tegas untuk mencabut Ikhwan sampai ke akar-akarnya, menghukum mati Sayyid Quthb, ideolog utamanya, serta tokoh-tokoh lain, menahan dan memenjarakan beribu-ribu orang, dan mengejar anggota-anggota lain hingga mereka bersembunyi atau lari ke pengasingan. Menjelang akhir periode Gamal Abdel Nasser, negara telah membelenggu lembaga keagamaan dan membungkam oposisi Islam.

Anwar Sadat, yang memerintah dari tahun 1971 sampai 1981, mewarisi Mesir yang telah mengalami kekalahan (dalam perang Arab-Israel) dan kemerosotan moral. Anwar Sadat berusaha membentuk identitas dan legitimasi politiknya sendiri, memanfaatkan Islam untuk menyingkirkan kubu Nasseris dan kelompok kiri, meningkatkan legitimasinya, dan mengerahkan dukungan rakyat.⁴

Inisiatif-inisiatif Islami Anwar Sadat tidak terbukti ketika dia menemukan kenyataan yang telah diketahui oleh banyak orang dalam konteks-konteks yang berbeda bahwa Islam adalah pedang bermata dua, yang dapat mendatangkan dan melenyapkan legitimasi, dapat mengerahkan dukungan dan dapat menggerakkan oposisi. Untuk itu Anwar Sadat pun sadar dengan apa yang telah dia lakukan selama ini tidak efektif untuk membungkam para oposan, khususnya gerakan

⁴ Dwiyan, Sihombing, *Buku Pintar Politikus Dunia; Anwar Sadat melangkah di antara jalan yang logis dan tidak logis*, Jakarta: Dela Pratasa, 2000, hal. 18

Islam politik radikal, maka dia pun mengeluarkan kebijakan yang sangat tidak populer, dengan menyatakan pemisahan agama dan politik, memperketat kendali atas Ikhwan, melarang kelompok-kelompok mahasiswa Islam, dan berusaha menasionalisasikan masjid-masjid agar lebih mudah mengontrol aktifitasnya.

Anwar sadat terbunuh oleh anggota Jama'ah al-Jihad pada tanggal 3 Oktober 1981 ketika dia sedang meninjau parade militer memperingati Perang 1973. Wakil Presiden Hosni Mubarak akhirnya mengisi jabatan presiden dengan semangat kekuasaan Islam militan. Ini perlu ia lakukan untuk lebih mengkonsolidasikan kekuatan dalam negeri dengan menarik simpati dari kelompok Islam. Tetapi itu hanya terjadi di masa-masa awal pemerintahannya, pada tahap selanjutnya dia tidak lebih baik (sikapnya terhadap kelompok Islam) dari apa yang dilakukan oleh Anwar Sadat.⁵

Mubarak mengupayakan langkah liberalisasi politik dan toleransi, sementara pada saat yang sama dia mengambil tindakan cepat dan tegas terhadap pihak-pihak yang ingin kembali menggunakan kekerasan untuk menentang otoritas pemerintah. Secara hati-hati ia memisahkan antara pembangkang agama, pembangkang politik, dan ancaman langsung bagi negara. Para pengkritik dari kalangan agama diberi wadah terbuka untuk mengungkapkan sikap oposisi mereka, dan boleh bersaing dalam pemilihan parlemen, menerbitkan koran, dan menyuarakan keberatan-keberatan mereka di media.

⁵ Abdurahman Kasdi, *Peran Ikhwanul Muslimin Dalam Perubahan Sosial Politik Di Mesir*, <http://www.psktti-ui.com/abstrak.php> diakses tgl 25 Februari 2008

Alasan utama mengapa pemerintah Presiden Mubarak mau menjalin hubungan baik dengan para penentangannya adalah kesadaran bahwa 'kebangkitan Islam' bukan merupakan suatu kekuatan asing dan subversif, melainkan kelanjutan dari gerakan-gerakan yang telah berumur panjang, yang melibatkan banyak unsur sesuai dengan perkembangan kapitalisme dan demokrasi."

Namun pada akhir tahun 1980-an, kebijakan Mubarak yang luwes, yang ternyata gagal mengkooptasi dan membungkam oposisi Islam secara efektif, mulai memberi tanggapan yang lebih agresif menghadapi tantangan kaum ekstremis agama (yang mendukung penggulingan pemerintah melalui kekerasan) maupun golongan moderat (yang berpartisipasi di dalam kerangka politik dan hukum yang ada). Mubarak mulai tidak pandang bulu dan memperluas perangnya sehingga tidak lagi hanya memusuhi kaum militan bawah tanah semacam *Jama'ah Islamiyah* dan *Jama'ah al-Jihad*, dengan melakukan pelecehan dan pemenjaraan demi mengendalikan kekuatan yang semakin berkembang, dan menentang gerakan-gerakan Islam yang lebih moderat seperti Ikhwanul Muslimin.⁶

Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hassan al-Banna sebagai respon atas kondisi Mesir yang dialami pula oleh negara-megara Muslim lainnya. Berada dalam subordinasi politik oleh kekuatan Barat yang hegemonik. Kondisi demikian ini membuat mereka rentan terhadap pengaruh budaya Barat. Hassan al-Banna percaya bahwa peradaban Barat terdiri atas ateisme, ketidakbermoralan, egoisme individu dan kelas, serta riba. Dia menyebut budaya Eropa (Barat) sebagai budaya

⁶ Loc.cit, Sihombing, hal.15

materialistik yang menghutangi kaum Muslim agar dapat mengendalikan ekonomi Muslim. Kejahatan Eropa yang diimpor ke Mesir, antara lain minuman keras, ruang dansa, dan pakaian wanita ala Barat.

Banna dan pembaharu Muslim sebelumnya seperti Jamaluddin al-Alghani dan Muhammad Abduh, percaya bahwa kelemahan dan kerentanan Muslim terhadap domiansi Eropa (Barat) disebabkan oleh penyimpangan kaum Muslim dari Islam 'sejati'. Untuk membangkitkan Mesir, kaum Muslim harus bertekad untuk kembali memahami dan hidup menurut Islam seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dan seperti yang dicontohkan generasi-generasi pertama Muslim (*salaf*).

Hassan al-Banna dengan Ikhwanul Musliminnya memulai langkah-langkah reformasi keummatan di Mesir dengan melakukan dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga terbangun jaringan antar jamaah di seluruh pelosok Mesir. Tujuan utama gerakan ini tetap pada poros utamanya yaitu menyebarkan dakwah Islam sejati. Untuk langkah ini maka pergerakan Ikhwanul Muslimin menyentuh aspek pendidikan secara menyeluruh. Berbagai aneka sekolah pun didirikan, dari sekolah dasar, menengah dan teknik.

Berbeda dengan Ikhwanul Muslimin pada era Hassan al-Banna yang menonjolkan aktifitas sosial dan menghindari konfrontasi langsung dengan kekuasaan, pada masa-masa berikutnya Ikhwanul Muslimin bersikap lebih kritis dan oposan. Ini dipicu oleh sikap pemerintah yang berkuasa yang bertindak lebih

represif terhadap keberadaan Ikhwan. Dimulai dari peristiwa pemilihan parlemen tahun 1945 yang diikuti oleh Ikhwanul Muslimin sebagai salah satu partai kontestan pemilu, dimana Ikhwanul Muslimin tidak mendapat satu kursi pun lantaran rezim otoriter Gamal Abdel Nasser berlaku curang, sampai pemberangusan aktifitas Ikhwan pada era Sadat dan Mubarak.

Sukses paling gemilang gerakan politik Ikhwanul Muslimin adalah pada pemilihan umum 1984, di mana Ikhwanul Muslimin yang berkoalisi dengan partai Wufu memenangkan 65 dari 450 kursi sehingga membuat mereka menjadi kelompok oposisi terbesar di Parlemen. Kemudian dalam pemilihan umum 1987, Ikhwan membentuk koalisi baru, Aliansi Islam, bersama Partai Buruh dan Partai Liberal. Berkampanye dengan slagon "Islam adalah solusi" dan menyerukan penerapan hukum Islam, mereka memenangkan 17 persen suara, dan tampil sebagai oposisi politik utama bagi pemerintahan Mubarak.⁷

Dengan selalu tampil sebagai oposisi sepanjang sejarah Ikhwanul Muslimin, baik oposisi liar (di luar parlemen) maupun resmi (dalam parlemen), Ikhwan menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah yang pada realitasnya tetap berat sebelah. Sepanjang sejarah Ikhwanul Muslimin, pemerintah yang berkuasa selalu menerapkan sistem kekuasaan yang otoriter dan tiranik yang kekuatannya sulit dibendung dengan kekuatan oposisi rakyat. Walau tampil sebagai oposisi

⁷ *Gerakan Ikhwan al-Muslimin,*

<http://www.forum.ekpkm.com/viewtopic.php?f:96&t=1073&start=0&st=0&sk=t&sd=fdad6fae32b44c3a62242ee0fdes468>, diakses tgl 28 Mei 2008



utama di parlemen, dengan 'hanya' mengantongi 17 persen suara, berat bagi Ikhwan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Semenjak Hosni Mubarak berkuasa, pemilihan presiden selalu menggunakan sistem calon tunggal. Sistem ini tidak memungkinkan calon alternatif selain Hosni Mubarak, sehingga nyaris tanpa ada perubahan yang berarti dalam sistem politik Mesir. Di sisi lain, pemilihan parlemen Mesir tampak memberi peluang lebih besar bagi demokrasi. Tapi ketika para calon Ikhwanul Muslimin tampak unggul, walaupun menghadapi halangan besar, pemerintah Mesir langsung kembali ke kebiasaan lama. Intimidasi pemilih, hambatan untuk masuk berbagai TPS, serta kekerasan yang mewarnai pemilu. Hal ini yang kemudian membuat penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai *"Pengaruh Gerakan Ikhwanul Muslimin terhadap Politik Luar Negeri Mesir"*

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Gerakan Islam politik menggambarkan dirinya dengan tegas sebagai gerakan sosial-politik, yang didasarkan atas Islam yang didefinisikan sebagai ideologi politik maupun agama. Gerakan ini berbeda dengan gerakan keagamaan lainnya yang lebih cenderung a-politik dan lebih berorientasi sosial-keagamaan dengan titik tekan gerakannya pada aktivitas dakwah, pendidikan dan penyantunan sosial. Gerakan Islam politik berorientasi pada kekuasaan yang diasumsikan

sebagai hak kaum Muslim yang harus direbut demi tegaknya nilai-nilai ajaran dan hukum Islam di negeri Muslim.

Ikhwanul Muslimin adalah contoh sebuah gerakan Islam politik di Timur Tengah yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir tahun 1928. Gerakan Islam politik *par-exellence* yang gigih memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara. Pengaruh kedua gerakan itu sangat terasa di dunia Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah. Gerakan Islam politik pada taraf selanjutnya mengalami transformasi akibat berbagai kegagalan yang dialaminya dalam memperjuangkan cita-cita sosial-politik Islamnya melawan para penguasa-penguasa di negeri Muslim yang cenderung represif terhadap gerakan Islam politik.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan Ikhwanul Muslimin dengan Pemerintah Mesir?
2. Bagaimana pengaruh Gerakan Ikhwanul Muslimin terhadap Politik Luar Negeri Mesir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui Hubungan antara Gerakan Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah Mesir.

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh Gerakan Ikhwanul Muslimin terhadap Politik Luar Negeri Mesir.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa mendatang, serta dapat memberikan tambahan informasi mengenai Pengaruh Ikhwanul Muslimin dalam perpolitikan di Mesir bagi peminat masalah hubungan internasional.
- b. Diharapkan sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang *concern* dengan persoalan gerakan politik Islam di Timur Tengah khususnya Mesir.

D. Kerangka Konseptual

Aktivitas – aktivitas Islam di Mesir, seperti di banyak bagian dunia muslim lain, belum juga surut, bahkan akarnya tertancap semakin dalam dan menyebar dikalangan masyarakat Mesir. Ragam dan macamnya, berbagai wajah dan posturnya, telah lama tertutup oleh persepsi orang yang menjalankannya dengan ancaman fundamentalis radikal yang monolitik. Arti penting dan pengaruh gerakan-gerakan Islam dalam konteks yang lebih luas dapat dilihat dari sejauh mana mereka mendapatkan legitimasi budaya, dan sejauh mana mereka menjadi bagian dari arus utama kehidupan dan masyarakat muslim, dan bukan semata-mata sebagai kelompok yang dipinggirkan dan diasingkan.

Konsep Pengaruh didefenisikan sebagai :

Kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Pengaruh dinyatakan secara tidak langsung oleh kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan yang menentukan *out comes*.⁸

Kegiatan saling mempengaruhi, misalnya dapat terjadi dalam aspek kehidupan manusia di antaranya aspek ekonomi dan aspek politik. Faktor-faktor ekonomi dapat mempengaruhi hasil politik begitu pula sebaliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa dinamika Hubungan Internasional umumnya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara aspek-aspek ekonomi dan aspek-aspek politik.

Dalam Paradigma Pluralisme menyatakan bahwa aktor-aktor dalam hubungan Internasional tidak saja terdiri dari aktor Negara melainkan pula aktor non Negara termasuk pula didalamnya *societal* (masyarakat). Menurut Charles Beitz bahwa "*nation-states are the most important actors for understanding international relations*".⁹

Gerakan Islam politik menggunakan simbol-simbol Islam dalam rangka menarik simpati rakyat yang mayoritas Islam untuk mendapatkan legitimasi politik. Dengan upaya ini negara seolah tampak telah menerapkan prinsip-prinsip Islam walaupun tampak sangat simbolis dan hanya menyentuh permukaannya saja, jika dilihat secara mendalam, kebijakan-kebijakan prinsipil yang telah

⁸ Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosdakarya :Bandung, hal. 31

⁹ Ibid, hal. 12

dilakukan pemerintah telah menyimpang dari ajaran Islam. Di samping politisasi agama, juga semarak fenomena "kembali ke pangkuan Islam" mulai menguat kembali dalam ruang publik sebagai strategi mempertahankan status quo pemerintahan.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.

Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri adalah:

Upaya suatu Negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.

Sementara itu Plano berpendapat bahwa:

Setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi yang konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta *power* yang dimiliki untuk mengjangkaunya. Tujuan dirancang, dipilih, dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah kebijakan (*revisionist policy*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional.¹⁰

Untuk memahaimi sifat dan tingkah laku politik luar negeri suatu Negara, dibutuhkan pemahaman hubungan antara negara dengan lingkungannya *internal* maupun *eksternal*. Konsep lingkungannya atau milieu (*environ-ment*) meliputi

¹⁰ Ibid, hal 51

semua fenomena dimana lingkungan aktivitas unit politik (negara) saling berhubungan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian preskriptif, yang merupakan penggabungan antara analisis eksplanatif dan analisis prediktif. Analisis eksplanatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana sistem politik luar negeri di Mesir. Sedangkan analisis prediktif digunakan untuk menjelaskan Pengaruh Ikhwanul Muslimin dalam Perpolitikan di Mesir.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah telaah pustaka (library research) yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, makalah, surat kabar, dan artikel yang berhubungan dengan masalah ini. Adapunpun tempat-tempat yang penulis kunjungi selama penelitian adalah :

1. Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin
3. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Perpustakaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional
5. Perpustakaan Iranian Corner

6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur. Adapun data sekunder yang dibutuhkan adalah data yang menyangkut mengenai Peranan Ikhwanul Muslimin dalam Perpolitikan Mesir.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif, dimana penulis akan menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta dan data yang diperoleh. Yang menjadi pokok analisis dalam penelitian ini adalah Peran Ikhwanul Muslimin dalam Perpolitikan di Mesir

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode deduktif, di mana penulis terlebih dahulu akan menggambarkan masalah secara umum, lalu kemudian menarik kesimpulan secara khusus. Hal-hal yang sifatnya umum yakni perkembangan mengenai sistem politik di Mesir. Sedangkan secara khusus akan dipaparkan bagaimana Peranan Ikhwanul Muslimin dalam perpolitikan di Mesir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA



A. Konsep Aktor Non Negara

Negara merupakan entitas/aktor utama dalam setiap hubungan internasional, khususnya hukum internasional. Fakta ini diperkuat oleh argumen Oppenheim yang mengatakan bahwa "Hukum antar bangsa dibuat oleh persetujuan bersama diantara negara-negara, dan bukan oleh individu perseorangan, sehingga negara merupakan subyek hukum internasional yang utama".¹¹

Berdasarkan hal inilah para analis kebijakan luar negeri seringkali mengenyampingkan aktor non-negara (*non-state actors*) dalam setiap kajiannya. Mereka menganggap aktor dalam kebijakan luar negeri haruslah memiliki kemampuan hukum yang berdaulat, dan hanya negara yang memiliki hal tersebut. Seiring dengan berkembangnya peta politik dunia, pergeseran terhadap paradigma negara-sentris tidak dapat dihindari lagi, karena peranan aktor non-negara dalam politik internasional menjadi hal yang sangat fundamental.

Beberapa aktor non-negara yang muncul menjadi kekuatan politik internasional antara lain :

1. organisasi - organisasi internasional

¹¹ Mukhtar Mai, *organisasi internasional*, http://www.sekitarkita.com/print.php?id=143_0_7_0 diakses tgl 5 mei 2008

- a. antar-pemerintah (*intergovernmental organizations*).
 - b. non-pemerintah (*non-governmental organizations* atau NGOs)
2. perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporations* / MNCs)
 3. Individu
 4. Belligerensi / Insurgensi.

Dari kelima aktor non-negara tersebut, hanya organisasi internasional antar-pemerintah (yang selanjutnya akan disebut dengan organisasi internasional); individu; dan beligerensi/insurgensi yang dapat disebut sebagai subyek hukum internasional. NGOs dan TNCs/MNCs tidak termasuk ke dalam subyek hukum internasional, karena tidak terikat atau tidak memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, dan pada dasarnya NGOs dan TNCs/MNCs didirikan berdasarkan hukum nasional dan tunduk kepada hukum nasional.

Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan neorevivalisme Islam atau gerakan "kebangkitan Islam" yang muncul di era mutakhir sebagai kelanjutan dari revivalisme Islam tetapi dengan corak/karakter yang militan dan radikal. Gerakan ini bersifat transnasional karena menjalar ke dan memiliki jaringan di berbagai Negara/ dunia Islam. Gerakan neorevivalisme Islam tersebut adalah : (1) Ikhwanul Muslimin, (2) Jihad Islam, (3) Hizbut Tahrir, dan (4) Salafi. Kelompok Islam Liberal lebih merupakan gerakan pemikiran dan cenderung elitis daripada gerakan aksi.

Hubungan dalam skala internasional tidak saja hanya ditandai dengan hubungan antar pemerintah suatu Negara dengan Negara lain, tetapi dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini hubungan antar individu atau kelompok dari masyarakat dari satu Negara dengan Negara lain dapat berlangsung secara interaktif. Berdasarkan fenomena inilah paradigma pluralis dalam ilmu hubungan internasional menganggap bahwa aktor non Negara dapat dimasukkan dalam hubungan internasional. Hal ini dapat dilihat dari pergerakan organisasi-organisasi masyarakat tingkat global yang dirasakan mampu mempengaruhi pola atau kebijakan dalam hubungan internasional.

Hubungan internasional merupakan kajian tentang hubungan atau interaksi yang melampaui batas Negara. Intraksi atau hubungan ini tidak terbatas hanya pada Negara dengan Negara saja tetapi juga merupakan hubungan yang turut melibatkan entitas lain yang sering disebut sebagai aktor. Aktor-aktor ini terdiri dari organisasi dan institusi internasional, lembaga-lembaga multinasional dan individu. Quincy Wright dalam buku *The Study of International Relation* menyatakan bahwa :

Hubungan Internasional menyangkut hubungan yang berlangsung antara beberapa jenis kelompok pemerintah, rakyat, wilayah, persekutuan, konfederasi, perserikatan, organisasi internasional termasuk didalamnya adalah organisasi industri atau perdagangan, organisasi budaya dan organisasi agama.¹²

¹² Quincy Wright dalam Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah, Perspektif Hubungan Internasional*, Bigrat, Yogyakarta, 2000, hal. 48

Negara sering dianggap sebagai pelaku utama dalam hubungan internasional walaupun belakangan ini perannya tidak lagi mendominasi hubungan internasional seiring dengan berkembangnya aktor-aktor lain. Aktor-aktor tersebut adalah unit atau entitas yang ada pada suatu Negara baik itu mewakili pemerintah atau pun non pemerintah. Dalam hubungan internasional para akademisi hubungan internasional mengkaji kebijakan dan tindakan aktor-aktor tersebut utamanya aktor Negara.

Dalam hubungan internasional dewasa ini menurut konsep world society, terdapat 3 aspek perubahan yaitu pelebagaan hubungan atau interaksi yang melintasi batas Negara, desentralisasi terhadap otoritas Negara yang berdampak pada perbedaan dalam tingkat interaksi, dan maraknya aktor-aktor non-state dalam hubungan internasional.¹³

Negara mungkin bertindak sebagai aktor terpenting dalam hubungan internasional namun mereka tetap dipengaruhi, dikontrol bahkan ditekan oleh berbagai aktor-aktor lain yang dikenal sebagai aktor bukan Negara (non state actor). Negara yang biasanya mendominasi hubungan internasional kini mulai tergeser dan kehilangan kedaulatannya ketika menghadapi aktivitas ekonomi dari organisasi transnasional serta ancaman kekerasan dan organisasi non Negara terkait dalam hubungan internasional.¹⁴

¹³ Ingo Take, *NGOs as Strategic Actors in International Politics*, World Society Research Group, Institute for Political Science, Technical University Darmstadt, 2006, hal. 5.

¹⁴ Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional 1, Konsep dan Teori*, Rafiak Aditama : Bandung, 2006, hal. 186.

Dari perspektif sistemik melihat bahwa sistem internasional kontemporer yang ditandai dengan perkembangan inter-relasi dan interdependensi antar politik domestik dan politik internasional yang unitnya antara lain: pertama, *stateness as variable*, yakni suatu pemikiran dari kaum tradisional tentang Negara tidak dapat dibenarkan lagi secara empirik. Sistem internasional diyakini telah bertengger diantara tertib dan anarki dan menghendaki penentuan atas aspek penilaian dan karakternya. Dengan demikian, atribut Negara telah dipertimbangkan tidak relevan lagi. Kedua *Significance of non-state actors*, bahwa arena intrnasional diisi oleh beberapa aktor. Interaksi dari aktor-aktor sub nasional telah dapat melampaui batas-batas Negara melalui bentuk-bentuk pengambilan keputusan internasional dan koordinasi atas aktivitas-aktivitas yang melintasi batas-batas Negara baik bilateral maupun multilateral.¹⁵

Berlangsungnya politik global yang mengesankan dunia tidak lagi terbatas (*borderless state*) itu mengakibatkan meluasnya cakupan Hubungan Internasional yang tidak lagi sekedar memfokuskan kajian kepada aktor negara. Keberadaan aktor-aktor non negara seperti perusahaan transnasional (*TNCs*), perusahaan multinasional (*MNCs*), *Non Government Organizations (NGOs)*, kelompok teroris, kelompok *guerrillas*, kelompok separatis atau bahkan individu sebagai aktor non negara mampu memainkan peranan penting. Interaksi yang terjalin mampu melahirkan jaringan keterikatan antara aktor-aktor lintas benua (*transcontinental*) atau lintas kawasan (*interregional*).

Selain itu, fokus kajian hubungan internasional pun tidak hanya terbatas pada cakupan *high politics* seperti upaya penciptaan perdamaian dan keamanan di tingkat negara semata, namun juga mencakup *low politics* seperti keamanan dan kesejahteraan dari segi ekonomi dan sosial, hak asasi manusia, masalah

¹⁵ Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional, Studi Pengenalan Umum, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002, hal 318.



lingkungan yang terangkum dalam konsep keamanan individu (*human security*).

Interaksi yang terjadi antar aktor-aktor di tingkat hubungan internasional menjadi kian beragam disertai pola hubungan yang kian kompleks. Masalahnya, interaksi lintas negara ini tidak selalu berjalan selaras dengan seluruh kepentingan para aktor yang terlibat sehingga bentuk kerjasama yang harmonis tidak selamanya tercipta antara aktor-aktor tersebut.

Dengan semakin kompleksnya interaksi yang dilandasi oleh berbagai macam kepentingan para aktor yang tidak serupa itulah, maka sumber-sumber konflik baru dapat bermunculan sehingga kejahatan lintas negara diantaranya seperti terorisme, pencucian uang (*money laundering*), penyelundupan manusia dan barang (*smuggling*), perampokan atau pembajakan di perairan, pembajakan pesawat udara, migrasi ilegal, perdagangan ilegal obat-obatan, pencurian sumber daya alam, polusi di periarain dan perdagangan ilegal senjata api (*illlict trafficking in arms*) menjadi tak terelakkan. Tentu saja, bentuk-bentuk kejahatan tersebut mampu menjadi potensi sumber konflik baru di kawasan jika tidak di tingkat hubungan internasional.

Implikasi dari kian eratnya keterkaitan faktor *intermestic* (*international and domestic*), meningkatnya jumlah aktor *transcontinental* atau aktor *interregional* serta tingginya intensitas laju interaksi antar aktor negara dan non negara adalah kebutuhan akan suatu lembaga internasional yang dapat berperan sebagai fasilitator bagi permasalahan perdamaian dan keamanan internasional yang muncul. Di sinilah peran dan kinerja PBB dibutuhkan dan dapat dirasakan

manfaatnya oleh negara-negara anggota.¹⁶

Pola kerjasama dengan menempatkan koalisi antara aktor negara maupun aktor non negara seperti yang diadopsi PBB, kian meningkat kualitas dan kuantitasnya, sehingga menjadi *trend* dalam hubungan internasional masa kini. misalnya format kerjasama dalam proses integrasi Uni Eropa, pembentukan komunitas ASEAN, pertemuan OKI, serta pertemuan APEC.

B. Konsep Politik Luar Negeri

Konsep politik luar negeri terdiri dari dua komponen yaitu politik dan luar negeri. Politik (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. *Policy* itu sendiri berakar pada konsep "pilihan (*choices*)" : memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep "wilayah" akan membantu upaya memahami konsep luar negeri (*foreign*). Kedaulatan berarti control atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu Negara. Jadi, politik luar negeri (*foreign policy*) berarti seperangkat ke luar wilayah suatu Negara.¹⁷

Secara umum, politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosdakarya : Bandung, hlm.47

kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu Negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya. Menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas Negara terhadap lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.¹⁸

Kebijakan Luar Negeri suatu Negara menunjukkan dasar-dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi terhadap Lingkungan Internasional.¹⁹ Karenanya Kebijakan Luar Negeri dapat juga diartikan sebagai strategi yang atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain oleh aktor hubungan internasional lain.²⁰

Kebijakan adalah arah tindakan yang direncanakan untuk mencapai sasaran. Miriam Budiarto mengemukakan konsep kebijakan sebagai berikut :

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok dalam usaha memiliki tujuan, kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.²¹

Dari Pendapat tersebut dapat dipilih suatu pengertian dasar bahwa :

1. Wujud dari kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang kemudian menjadi dasar serangkaian tindakan.

¹⁸ Ibid, hlm. 50

¹⁹ Dahlan Nasution, *Politik Internasional : Konsep dan Teori*, Jakarta : Erlangga, 1989 hlm. 9

²⁰ Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Terj. Drs Wawan Djuanda Bandung: CV. Abardin, 1990, hlm. 36

²¹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia, hlm. 12

2. Kebijakan diadakan untuk mencapai tujuan tertentu, dimana tujuan-tujuan tersebut telah dipilih sebelumnya termasuk cara-cara mencapainya.
3. Kebijakan itu dibuat oleh pihak tertentu yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya.

Perwujudan dari kebijakan adalah sekumpulan undang-undang, dimana kemudian Undang-undang itu menjadi dasar tindakan suatu Negara untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut berdasarkan pada kepentingan seluruh bangsa yang kemudian disebut dengan Kepentingan Nasional. Pihak yang berperan sebagai pembuat kebijakan adalah pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Politik Luar Negeri atau Kebijakan Luar Negeri tidak terlepas dari berbagai perkembangan keadaan nasional dan internasional, bahkan Politik Luar Negeri (Polugri) merupakan cerminan dari kebijakan dalam negeri yang diambil oleh Pemerintah.

Ada 5 komponen yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan kebijakan Luar Negeri,²² yaitu :

1. Memperhatikan Integritas Negara

Konsep Kesatuan Nasional dalam Negara meliputi pengelolaan, pengawasan, dan pengaturan wilayah dari suatu Negara, termasuk

²²Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta : Rajawali Pers, 1993, hlm. 616-619.

mengurus warga Negara di dalam dan di luar negeri. Prinsip kesatuan geografis menimbulkan 3 jenis masalah bagi para pembuat keputusan ; (1) Pemeliharaan hak atas semua daerah yang dinyatakan sebagai milik Negara; (2) Penyerahan daerah tertentu ; (3) Tambahannya wilayah-wilayah baru dan pemilikan-pemilikan.

2. Meningkatkan Kepentingan Ekonomi

Prinsip yang kedua yang mendasari pemilihan tujuan Kebijakan Luar Negeri ialah kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran Negara. Bangsa-bangsa yang terkuat dan terbesar pun tidak dapat menjamin kemakmuran ekonomi dan tingkat kehidupan yang tinggi dengan cara mengasingkan diri dari jalur perdagangan dunia. Kemakmuran Negara bergantung pada banyak faktor yang kompleks dan erat berkaitan. Faktor-faktor ini dapat dibagi dalam 2 kategori : Pertama, modal Negara termasuk letak geografisnya dalam hubungannya dengan pusat industri dunia, sumber alam, iklim dan jumlah serta watak penduduknya; kedua, cara modal-modal tersebut dimanfaatkan merupakan gambaran dari status kebudayaan Negara.

3. Menjamin Keamanan Nasional

Keamanan Nasional merupakan prinsip ketiga yang melandasi penentuan tujuan kebijaksanaan politik. Asumsi bahwa kebijakan Luar Negeri harus direncanakan untuk melindungi diri dari serangan

menyiratkan adanya kemungkinan bahaya. Sasaran dari kebijaksanaan keamanan nasional adalah melindungi dan mengembangkan nilai-nilai nasional. Nilai Nasional yang paling fundamental adalah Kelangsungan Hidup. Tanpa itu, suatu Negara tidak akan mampu memenuhi nilai-nilainya yang lain. Jadi fokus utama dari kebijaksanaan keamanan nasional adalah untuk menjamin kelangsungan hidup suatu Negara.

4. Melindungi Martabat Nasional

Prinsip dasar yang keempat yang menuntun perumusan kebijakan adalah memelihara harkat nasional. Sama seperti individu-individu yang memikirkan reputasi pribadi dalam masyarakat dimana mereka hidup, demikian juga suatu Negara berkewajiban memikirkan pengaruhnya dalam hubungannya dengan Negara-negara lain dalam urusan internasional.

5. Kepentingan Kekuasaan

Kepentingan vital yang terakhir merupakan prinsip-prinsip yang menuntun dalam merumuskan tujuan kebijaksanaan dalam mencapai kekuasaan. Kekuasaan adalah alat kemampuan untuk memprakarsai dan mengontrol peristiwa-peristiwa dan mendapatkan hasilnya. Raja, diktator, dan presiden adalah lambang kekuasaan. Kekuasaan politik adalah kemampuan di dalam tiap hubungan manusia untuk menguasai perilaku dan mempengaruhi pemikiran untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dalam



hal ini kekuasaan barangkali adalah prinsip yang paling universal dari semua prinsip yang mengkondisikan tujuan kebijaksanaan luar negeri.

Kepentingan Nasional sangat penting untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui tehnik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik Internasional.²³

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu Negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu Negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan Negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.

Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*). Dalam hal ini kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen konkrit yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. Jadi,

²³ loc.cit, Perwita, hlm. 35

kebijakan luar negeri dapat di bedakan sebagai sekumpulan orientasi, sekumpulan komitmen dan rencana aksi, dan sebagai suatu bentuk perilaku.

C. Konsep Pengaruh

Konsep pengaruh merupakan konsep yang sering dibahas bersama dengan kekuasaan. Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa kekuasaan dapat mengadakan sanksi dan pengaruh. Pengaruh biasanya merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang dan sering bersaing dengan faktor lain. Bagi pelaku yang dipengaruhi masih terbuka alternatif lain untuk bertindak. Akan tetapi, sekalipun pengaruh sering kurang efektif di bandingkan kekuasaan, ia kadang-kadang mengandung unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu sering kali cukup berhasil.

Kebanyakan sarjana, termasuk Floyd Hunter (1953) dalam karyanya *Community Power Structure* berpendapat bahwa : "Kekuasaan merupakan pengertian pokok, dan pengaruh bentuk khususnya." Demikian pula pendapat Carl Friedrich (1967) dalam bukunya, *An Introduction to Political Theory*. Namun Laswell dan Kaplan berbeda pendapat dan menganggap konsep pengaruh sebagai konsep pokok, dan kekuasaan sebagai bentuk khas dari pengaruh. Mengenai masalah sanksi tidak ada perbedaan pendapat, dan kedua belah pihak setuju bahwa yang membedakan kekuasaan dan pengaruh adalah ancaman sanksi. Laswell dan Kaplan merumuskan bahwa :

Kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan orang lain melalui sanksi yang sangat berat (yang benar-benar akan dilaksanakan atau yang berupa ancaman sanksi) itulah yang membedakan kekuasaan dari pengaruh pada umumnya. Kekuasaan merupakan kasus khusus dari penyelenggaraan pengaruh; ia merupakan proses ancaman, jika mereka tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang dimaksud (*It is the threat of sanctions which differentiates power from influence in general. Power is a special case of the exercise of (actual or threatened) severe deprivation for non-conformity with the policies intended*).²⁴

Beberapa sarjana kontemporer melihat pengaruh sebagai bentuk khusus dari kekuasaan antara lain seorang ahli ilmu politik Belanda Uwe Becker :

“Pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang yang – berbeda dengan kekuasaan – tidak begitu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan (*invloed is formatif vermogen dat – in tegens telling tot macht – niet direct verbonden is met strijd en de doorzetting van belagen*)”²⁵

Defenisi lain adalah dari Norman Barry :

Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang, jika seorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya (*Influence is a type of power in that a person who is influenced to act in a certain way may be said to be caused so to act, even though an overt threat of sanction will not be the motivating force*).²⁶

²⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik* Edisi Revisi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 35

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid, hlm 36

Robert Dahl, dalam ulasannya mengenai kekuasaan yang pertama *The Concept of Power* (1957), melihat kekuasaan sebagai konsep pokok dan mengatakan : "A mempunyai kekuasaan atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan (*A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do*).²⁷

Menurut Rubenstein asumsi-asumsi dasar konsep pengaruh yaitu :

1. Secara operasional konsep pengaruh digunakan secara terbatas dan spesifik mungkin dalam konteks transaksi diplomatik.
2. Sebagai konsep multidimensi, konsep pengaruh lebih dapat diidentifikasi daripada diukur oleh beberapa kebenaran (proposisi). Sejumlah konsep pengaruh dapat diidentifikasi hanya sedikit, dikarenakan tingkah laku B yang dapat mempengaruhi A terbatas.
3. Jika pengaruh A terhadap B besar, akan mengancam sistem politik domestik B, termasuk sikap, perilaku domestik dan institusi B.
4. Pengetahuan yang dalam mengenai politik domestik B sangat penting untuk mempelajari hubungan kebijakan luar negeri antara A dan B dikarenakan pengaruh tersebut akan dimanifestasikan secara konkret dalam konteks isu area tertentu dari B.
5. Pada saat seluruh pengaruh dari suatu Negara dikompromikan dengan kedaulatan Negara lain secara menyeluruh dan kadang-kadang dapat memperkuat atau memperlemah kekuatan pemerintah dari Negara yang

²⁷ loc.cit, Anak Agung Banyu, hlm. 32

dipengaruhi, terdapat batasan dimana pengaruh tersebut tidak berpengaruh terhadap suatu Negara atau pimpinan Negara tersebut. Pemerintah B tidak akan member konsensi-konsensi terhadap A yang dapat melemahkan kekuatan politik domestic kecuali bila A menggunakan kekuatan militer terhadap B.

6. Negara donor berpengaruh terhadap Negara lain melalui bantuan-bantuan yang diberikannya, tidak hanya karena adanya timbal balik dari B kepada A, akan tetapi juga reaksi dari C, D, E, F,... yang dapat berpengaruh terhadap hubungan A dan B.
7. Data – data yang relevan untuk mengevaluasi pengaruh terdiri dari lima kategori :
 - a. Ukuran perubahan konsepsi dan tingkah laku;
 - b. Ukuran interaksi yang dilakukan secara langsung (kuantitas dan kumpulan data);
 - c. Ukuran dari pengaruh yang ditunjukkan;
 - d. Studi kasus; dan
 - e. Faktor perilaku idiosinkratik.
8. Sistem yang biasa digunakan untuk menentukan pengaruh adalah dengan menggunakan variabel yang ada diantara Negara-negara. Yang

paling baik adalah model yang dapat digunakan untuk tipe masyarakat dengan area geografis dan budaya yang sama.²⁸

Pengaruh dapat dijalankan melalui enam cara, yaitu :

- a. Persuasi
- b. Tawaran imbalan
- c. Pemberian imbalan
- d. Ancaman hukuman
- e. Tindakan hukuman tanpa kekerasan
- f. Kekerasan

Dalam kaitannya Permasalahan Ikhwanul Muslimin dengan Pemerintah Mesir penulis menarik kesimpulan bahwa teknik umum yang digunakan dalam tindakan pengaruh adalah Tindakan Kekerasan, hal ini terjadi pada Tanggal 23 Juli 1952, pasukan Mesir di bawah pimpinan Muhammad Najib, bekerja sama dengan Ikhwan melancarkan Revolusi Juli. Tetapi kemudian Ikhwan menolak kerja sama dalam pemerintahan, karena mereka mempunyai pendapat dan pandangan yang jelas tentang metode revolusi. Gamal Abdul Nasser menganggap penolakan tersebut sebagai penolakan terhadap mandat revolusi.

Kemudian kedua belah pihak terlibat serangkaian konflik dan permusuhan yang semakin hari semakin tajam. Akibatnya, tahun 1954, pihak pemerintah melakukan penangkapan besar-besaran terhadap anggota Ikhwan dan beribu-ribu

²⁸ Loc.cit, Rodee, hlm 52



orang dijebloskan ke dalam penjara. Alasan pemerintah, karena orang Ikhwan telah berupaya memusuhi dan mengancam kehidupan Gamal Abdul Nasser di lapangan Mansyiyah, Iskandariyyah.

BAB III
GAMBARAN UMUM GERAKAN ISLAM IKHWANUL MUSLIMIN DAN
POLITIK LUAR NEGERI MESIR

1. PROFIL IKHWANUL MUSLIMIN

1.1 Latar Belakang Gerakan Ikhwanul Muslimin

Istilah Penulisan Ikhwanul Muslimin terdapat dalam beberapa bentuk tulisan yakni Ikhwanul Muslimin, Ikhwan Al-Muslimin, Al-Ikhwan Al-Muslimin, ataupun Al-Ikhwan Al-Muslimun. Keempatnya memiliki arti yang sama yaitu persaudaraan sesama umat muslim. Ikhwanul Muslimin adalah penulisan dalam bahasa Indonesia dan kata yang ditambahkan "Al" di depannya merupakan penulisan dalam bahasa Arab, adapun kata muslimin merupakan bentuk jamak dari muslimun. Dalam keseluruhan pembahasan ini penulis secara konsisten memilih Ikhwanul Muslimin dalam penulisan nama gerakannya.

Dari segi bahasa Ikhwanul Muslimin berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata Ikhwan dan Al-Muslimin. Kata Ikhwan adalah bentuk jamak dari kata al-akh. Bentuk jamak lainnya kata tersebut adalah Ikhwan, Ukhwatun, Ukhwanun, Ukhana, dan Ukha'un yang berarti saudara atau persaudaraan. Sedangkan kata muslimin merupakan bentuk jamak dari kata muslim yang berarti orang-orang yang beragama islam atau orang-orang yang berserah diri, patuh dan tunduk kepada Allah, agar selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat.²⁹

²⁹Fathi Osman, *Ikhwan & Democracy, Ikhwanul Muslimin membedah demokrasi*, Titian Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 13

Dalam bahasa Inggris Ikhwanul Muslimin dikenal dengan istilah Muslim Brotherhood yang berarti persaudaraan orang-orang muslim, dan berarti pula anak laki-laki dari orang tua yang sama, seseorang yang terikat dengan orang Islam sebagai anggota masyarakat, sesama anggota masyarakat agama. Selanjutnya kata brother dalam konteks Ikhwanul Muslimin mengandung dua pengertian, pertama berarti perasaan bersaudara dengan orang lain, kedua sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Dengan demikian, Ikhwanul Muslimin merupakan sekumpulan orang yang antara satu dan lainnya terikat oleh tali persaudaraan yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.³⁰

Dalam perkembangan selanjutnya Ikhwanul Muslimin lebih dikenal sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh Hassan Al-Banna yang dilahirkan pada tahun 1906 di Al-Mahmudiyah Mesir. Sebagai sebuah organisasi sosial dan kemasyarakatan, kehadiran Ikhwanul Muslimin tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat yang terjadi di Mesir. Sebagaimana gerakan pembaharuan Islam pada umumnya, Ikhwanul Muslimin muncul sebagai reaksi terhadap sosio moral di Kairo. Masyarakat Kairo yang terlihat kurang peduli lagi terhadap nilai-nilai Islam.

Selanjutnya sejarah mencatat dunia Islam pada saat itu, khususnya Mesir terlampaui banyak dikendalikan oleh barat baik dari segi moral maupun politik. Keadaan tersebut diawali ketika bulan November 1914 Inggris mengumumkan perang melawan kesultanan otonom Turki, dan kemudian pada bulan berikutnya

³⁰ Ibid, hal 15

Inggris memproklamkan Mesir sebagai wilayah protektoratnya. Sebagai akibat dari intervensi dan imperialisme barat tersebut, umat Islam semakin terbuai oleh budaya lokal yang jumud serta lemah dalam mengamalkan nilai-nilai spiritual yang murni.³¹

Akibatnya kehidupan keagamaan menjadi cenderung formalis dan penuh kemunafikan. Sementara praktek mistik membawa masyarakat kepada kehidupan tahayul dan memadamkan sifat orisinal Islam yang dikenal kreatif. Selain faktor-faktor tersebut diatas, faktor lainnya yang menyebabkan berdirinya Ikhwan Muslimin adalah masalah kekacauan dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan terjadi dualisme, di satu pihak sekolah-sekolah pemerintah hanya mementingkan masyarakat, sedangkan di pihak lain sekolah agama melupakan pengetahuan umum.

Selain itu situasi politik yang terjadi di Mesir pada saat itu juga mempengaruhi kelahiran organisasi ini. Di bidang politik luar negeri, dunia Islam terpecah kedalam kelompok Negara-negara kecil, dan dalam keadaan itu pula Imperialis merampas Negara-negara Arab untuk dieksploitasi sumber kekayaan alamnya.

Pemahaman Ikhwan terhadap Islam bersifat universal, tidak mengenal adanya pemisahan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Ikhwan berusaha keras memperluas kawasan gerakannya sampai menjadi sebuah gerakan internasional.

³¹ Maryam Jamila, *Para Mujahid Agung*, (terj.) Hamid Luthfi AB., Bandung : Mizan, 1989, hal. 136.

Ikhwanul Muslimin merupakan satu-satunya harakah Islamiyah yang terorganisir dengan rapi, dimana para pengikutnya dikelompokkan dalam tingkatan dan tahapan tertentu dengan spesialisasi masing-masing, maka terdapat anggota tingkat pertama, kedua dan seterusnya. Seseorang tidak dinaikkan tingkat sebelum dinilai layak atau tidak layak. Setiap anggota membuat bai'ah atau sumpah setia.

Para anggota diberi Tarbiyah agar menghafal Qur'an, setia pada shalat berjama'ah, mempelajari Al Qur'an, Hadits serta ilmu syariah lainnya. Mereka diajar menggunakan bermacam-macam senjata dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pada akhir tarbiyah mereka akan di saring untuk melayakkan mereka ketahap selanjutnya, hal ini berjalan secara alami tanpa ada hal-hal yang memberatkan anggotanya.

Konsep Pembentukan Jama'ah Ikhwanul Muslimin

1. Pembentukan pribadi muslim
2. Pembentukan Keluarga Muslim
3. Pembentukan Masyarakat Muslim
4. Pembentukan Negara Muslim serta penyatuan Muslim Dunia³²

Konsep dakwah Ikhwanul Muslimin adalah persaudaran dibawah sistem tanzim, saling melengkapi, jauh dari perselisihan fiqh, jauh dari intervensi penguasa, bertahap dalam melangkah, dakwah rabbaniyah, dakwah secara global dan sebagainya. Manhaj Ikhwanul Muslimin banyak mengadopsi semua nilai

³² Musthafa Abd Rahman, *Ikhwan Al-Muslimin*,
<http://www.almanhaj.or.id/category/view/76/page/1> diakses tgl 26 April 2008

positif dari manhaj dakwah salafiah, tariqat sunniah, hakikat sufiah, siasah syar'iah, nadi riadhah, al buhus ilmiah, syikah iqtisadiyah, dan fikrah ijtimaiyah.³³

Jamaah Ikhwanul Muslimin adalah salah satu jamaah dakwah terbesar yang hingga kini terus melakukan berbagai kegiatannya. Para simpatisan, pendukung dan para kadernya tersebar di berbagai wilayah di seluruh dunia. Mereka melakukan kegiatan dakwahnya dengan berpedoman kepada berbagai arahan dan pemikiran yang ditelurkan oleh pemikir besar Ikhwanul Muslimin sekaligus pendirinya, Imam Syahid Hasan Al-Banna.

1.2 Aktor Gerakan Islam Ikhwanul Muslimin

Pada Maret 1928 Ikhwanul Muslimin di dirikan oleh Hassan al-Banna, bersama keenam tokoh lainnya, yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-Maghribi. Ikhwanul Muslimin pada saat itu dipimpin oleh Hassan al-Banna. Pada tahun 1930, Anggaran Dasar Ikhwanul Muslimin dibuat dan disahkan pada Rapat Umum Ikhwanul Muslimin pada 24 September 1930.³⁴

Kemudian pada tahun 1934, Ikhwanul Muslimin membentuk divisi Persaudaraan Muslimah. Divisi ini ditujukan untuk para wanita yang ingin bergabung ke Ikhwanul Muslimin. Walaupun begitu, pada tahun 1941 gerakan

³³Ibid

³⁴*Gerakan Dakwah Islam Ikhwanul Muslimin*,
<http://www.alislam.or.id/organisasi/arsip/00000001.html>, diakses tanggal 28 Mei 2008

Ikhwanul Muslimin masih beranggotakan seratus orang, hasil seleksi dari Hassan al-Banna. Pada tahun 1948, Ikhwanul Muslimin turut serta dalam perang melawan Israel di Palestina. Saat gerakan ini sedang berkembang pesat, Ikhwanul Muslimin justru dibekukan oleh Muhammad Fahmi Naqrasyi, Perdana Menteri Mesir tahun 1948. Berita penculikan Naqrasyi di media massa tak lama setelah pembekuan Ikhwanul Muslimin membuat semua orang curiga pada gerakan Ikhwanul Muslimin.³⁵

Secara misterius, pendiri Ikhwanul Muslimin, Hassan al-Banna meninggal dunia karena dibunuh pada 12 Februari 1949. Kemudian, tahun 1950, pemerintah Mesir merehabilitasi organisasi Ikhwanul Muslimin. Pada saat itu, parlemen Mesir dipimpin oleh Mustafa an-Nuhas Pasha. Parlemen Mesir menganggap bahwa pembekuan Ikhwanul Muslimin tidak sah dan inkonstitusional. Ikhwanul Muslimin pada tahun 1950 dipimpin oleh Hasan al-Hudhaibi. Kemudian, tanggal 23 Juli 1952, Mesir dibawah pimpinan Muhammad Najib bekerjasama dengan Ikhwanul Muslimin dalam rencana menggulingkan kekuasaan monarki Raja Faruk pada Revolusi Juli. Tapi Ikhwanul Muslimin menolak rencana ini, dikarenakan tujuan Revolusi Juli adalah untuk membentuk Republik Mesir yang dikuasai oleh militer sepenuhnya, dan tidak berpihak pada rakyat. Karena hal ini, Gamal Abdul Nasser menganggap gerakan Ikhwanul Muslimin menolak mandat revolusi. Sejak saat ini, Ikhwanul Muslimin kembali dibenci oleh pemerintah.

³⁵ *Gerakan Ikhwan al-Muslimin*,
<http://www.forum.ekpkm.com/viewtopic.php?f:96&t=1073&start=0&st=0&sk=t&sd=fdad6faac32b44c3a62242ec0fdes468>, diakses tanggal 28 Mei 2008

Kemudian, pada tahun 1954, terjadi penangkapan besar-besaran terhadap anggota Ikhwanul Muslimin di seluruh Mesir. Ikhwanul Muslimin dituduh telah berupaya memusuhi dan mengancam Gamal Abdel Nasser sebagai pemimpin negara saat itu. Atas hal ini, pemerintah Mesir memberikan hukuman mati kepada enam anggota Ikhwanul Muslimin. Hal ini kembali terulang pada saat tahun 1965, dimana pemerintah Mesir kembali mengadakan penangkapan besar-besaran kepada anggota Ikhwanul Muslimin. Pemerintah Mesir menjatuhkan hukuman gantung kepada Sayyid Quthb, Yusuf Hawasi dan Abdul Fattah Ismail. Sejak tahun 1965, organisasi Ikhwanul Muslimin berjalan dengan rahasia sampai Gamal Abdel Nasser meninggal dunia pada tahun 1970.³⁶

Ketika Anwar Sadat mulai berkuasa, anggota Ikhwanul Muslimin yang dipenjara mulai dilepaskan. Menggantikan Hudhaibi yang telah meninggal pada tahun 1973, Umar Tilmisani memimpin organisasi Ikhwanul Muslimin. Umar Tilmisani menempuh jalan moderat dengan tidak bermusuhan dengan penguasa. Rezim Hosni Mubarak saat ini juga menekan Ikhwanul Muslimin, dimana Ikhwanul Muslimin menduduki posisi sebagai oposisi di Parlemen Mesir.

Islam adalah satu sistem yang menyeluruh serta merangkumi semua aspek kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air ataupun pemerintahan dan rakyat. Ia adalah akhlak dan kekuatan ataupun rahmat dan keadilan. Ia adalah kebudayaan dan undang-undang ataupun keilmuan dan kehakiman. Ia juga adalah materi dan harta benda ataupun kerja dan kekayaan. Ia adalah jihad dan dakwah ataupun

³⁶ Ibid

ketenteraan dan fikrah. Sebagaimana juga ia adalah akidah yang lurus dan Ibadah yang benar, yang pada hakekatnya sama.³⁷

Pernyataan tersebut merupakan sebagian kecil dari sekelumit pemahaman dan pemikiran Hasan Al Banna dalam mendefinisikan Islam, ini merupakan hal yang baru dalam dunia Islam yang dilakukan Hasan Al Banna dalam menterjemahkan Islam dalam kehidupan. Pemikiran beliau sangat jauh berbeda dengan cara berfikir penguasa dunia Islam saat itu, dimana seruan agar mencontohi cara barat oleh Kamal Attaturk bertiup kencang dan tidak ada henti. Bukan hanya itu, bahkan majalah-majalah dan surat kabar yang membuat propaganda dengan slogan "Mesir adalah sebagian dari Eropa" telah membanjiri pasaran. Para nasionalis mendesak pemerintahan Mesir agar kembali ke puncak kejayaan Firaun dan mencungkil adat-adat bangsa Mesir purba.³⁸

Melihat fenomena ini membuat Hassan al Banna merasa sedih, sebab sebagian besar orang terhormat dan berpengaruh menyertai barisan modernis yang menyesatkan umat Islam. Dalam keadaan sedih dan pilu ini, beliau berusaha merapatkan diri dengan Sayyid Rashid Rida' serta murid-muridnya. Di sinilah titik permulaan berdirinya satu harakah Islam yang besar dan tersusun untuk menghancurkan Jahilliah Modern dengan segala pemikirannya. Beliau mulai

³⁷ *Ikhwanul Muslimin*,
<http://www.eramuslim.com/berita/ikhwanul-muslimin.htm> diakses tgl 26 April 2008

³⁸ *Mengenal Ikhwanul Muslimin*,
<http://ihwansalafy.wordpress.com/2007/0924/mengenal-ikhwanul-muslimin/> diakses tgl. 26 April 2008



mendidik orang-orang dengan penuh sabar tentang pentingnya Islam dalam kehidupan individual dan masyarakat.

Upaya Hasan Al-Banna untuk menegakkan sistem pemerintahan Islam tidak pernah berhenti. Dan seruan untuk mengimplementasikan Hukum Islam berulang kali dikemukakannya dalam pidato-pidato dan tulisan-tulisannya hal ini antara lain dapat ditemukan dalam karya-karya yang ditulisnya pada awal tahun empat puluhan.

Hasan Al-Banna mulai membangun gerakan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928, yakni di kota Ismailiyah, yang terletak di Terusan Suez, ketika itu Mesir secara de facto berada di bawah pendudukan Inggris, meskipun kemerdekaan negeri itu telah diberikan Inggris pada 1922. Sebutan "Sultan" diganti dengan "Raja", untuk memperlihatkan telah digunakannya bentuk pemerintahan monarki. Raja pun telah mengeluarkan keputusan yang menerangkan telah terbentuknya suatu parlemen monarki. Pendudukan Inggris selama Perang Dunia II benar-benar dirasakan sangat pahit oleh rakyat Mesir. Ini terutama dikarenakan beban ekonomi yang kian berat dan Intervensi Inggris yang tanpa batas terhadap kehidupan politik Mesir. Dominasi oleh penguasa-penguasa barat juga terjadi diberbagai Negara Islam lainnya sejak runtuhnya kekhalifaan Osmaniyyah pada pasca Perang Dunia I.³⁹

Hasan Al-Banna berusaha mengkaji kembali kemungkinan di gerakkannya suatu "*National Revolution*" (Revolusi Nasional). Selain itu, ia juga mengkaji

³⁹ Ibid.

hubungan kekeluargaan antara beberapa Negara muslim. Meski demikian, dengan menekankan pada tuntutan yang lebih umum dari umat islam yakni "untuk mendapatkan kemerdekaan sepenuhnya, mengimplementasikan islam kedalam kehidupan bernegara dan memperkuat persatuan di kalangan Negara-negara muslim".⁴⁰

Al-Banna selanjutnya bawahi adanya kecenderungan yang tampak semakin jelas bahkan sebelum berlangsungnya Perang Dunia II, yakni perlombaan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan dikalangan masyarakat Eropa. Kecenderungan itu tentu saja mengorbankan banyak pihak karena melibatkan konfrontasi militer. Oleh karena itu walaupun berbagai macam tekanan terjadi terhadap kaum muslimin, hal itu mungkin akan memberikan kesempatan baru kepada umat islam untuk mencapai tujuan dan kemudian mengadakan perbaikan bagi suatu kekuatan islam yang dilengkapi nilai-nilai estetisnya, sebagai pengganti dominasi pribadi dan materialism.

Apabila Ikhwanul Muslimin merencanakan untuk memikul tanggung jawab dan kewajiban Islam untuk menentang pendudukan militer dan eksploitasi ekonomi di negeri-negeri Islam oleh Barat, khususnya Mesir, maka tentu saja mereka terpaksa melakukan konfrontasi yang tak dapat diletakkan (Inevitable Confrontation). Dengan demikian Ikhwanul Muslimin harus berhadapan langsung dengan kekuatan-kekuatan penjajah, musuh-musuh Islam maupun musuh dari umat Islam sendiri.

⁴⁰ Jamila, Maryam, *Para Mujahid Agung* (terj), Bandung: Mizan, 1989, hlm. 23

Ikhwanul Muslimin selanjutnya dengan konsekuen gambaran tentang cita-cita mereka salam slogan : "misi kebenaran, kemerdekaan, dan kekuatan". Hasan Al-Banna telah mempersembahkan suatu kerangka kerja yang paling utama, yaitu : "jihad" penekanan tentang kerangka kerja dengan "jihad" ini dapat dijumpai dalam seluruh tulisan dan pidatonya. Al-Banna selalu menegaskan bahwa cara-cara untuk menyampaikan pesan-pesan ideologis (dakwah) tidak pernah berubah, dan semua itu dapat diringkaskan dalam tiga prinsip :

- a. Iman yang teguh (*the deep faith*)
- b. Organisasi yang baik (*the perfect organization*)
- c. Kerja yang terus menerus (*the continues work*)⁴¹

Al-Banna telah memperingatkan seluruh pengikut Ikhwanul Muslimin tentang prinsip-prinsip itu. Setelah mereka mengetahui, mereka harus menghadapi tantangan besar dari mereka yang tidak ingin melihat kemajuan Islam sebagai satu-satunya jalan hidup yang paling komprehensif dari para ulama pemerintah yang akan melihat suatu pemahaman Islam lain dari pandangan mereka. Karena itu oposisi Ikhwanul Muslimin sebagaimana juga terhadap seluruh anggotanya akhirnya tidak dapat dielakkan, dan itu berlangsung cukup lama. Tetapi Al-Banna dengan para pengikut serta pendukungnya tidak berkecil hati, mereka menganggap hal ini sebagai suatu ujian yang mesti di terima.

⁴¹ Mahmud, Ali Abdul Alim, Metode Pendidikan Ikhwanul Muslimin (terj), Jakarta: Gema Insani Pers, 1997, hlm. 27

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan gerakan Ikhwanul Muslimin mulai bergabung dalam perpolitikan di Mesir, keikutsertaan mereka pada Pemilu 7 September 2005 lalu membuktikan eksistensi mereka di kancah politik Mesir, dan mereka berhasil meraih kursi di parlemen yang membawa nama gerakan ini sebagai partai oposisi. Aktor utama di balik gerakan Ikhwanul Muslimin adalah Hasan Al-Banna dimana ia membangun gerakan ini dengan berlandaskan ideology pemikirannya sebagai bentuk ketidakpuasannya atas pemerintah Mesir, beliau menghimpun anggotanya dan menjalankan misi mendirikan gerakan yang bertujuan membangun Mesir menjadi Negara Islam yang menerapkan syariat Islam dan mampu membendung arus sekularisasi di dunia Arab dan Islam. Aktor pemikir Ikhwan kedua setelah Hasan Al-Banna adalah Sayyid Quthb.

1.3 Tujuan Gerakan Islam Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi Islam berlandaskan ajaran Islam. Ia merupakan salah satu jamaah dari beberapa jamaah yang ada pada umat Islam, yang memandang bahwa Islam adalah universal dan menyeluruh, bukan hanya sekedar agama yang mengurus ibadah ritual saja. Tujuan Ikhwanul Muslimin adalah mewujudkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka

yang terampas, kemudian membawa bendera jihad dan dakwah kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam.⁴²

Ikhwanul Muslimin menolak segala bentuk penjajahan dan monarki yang pro-Barat. Pada tahun 1928 Ikhwanul Muslimin resmi didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan nasib malang yang menimpa umat Islam saat itu. Hasan Al Banna jauh berbeda dengan tokoh Islam lainnya seperti Jamaluddin Al-Afghani, Sheikh Muhammad Abduh dan Sayyid Rashid Ridha', mereka lebih mengutamakan penulisan dan dakwah billisan dalam kiprahnya. Ini disebabkan Harakah Islam yang dipimpin Hasan Al Banna sangat syumul dan komplit sehingga menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, akidah, mu'amalah, akhlak, politik, kebudayaan, ekonomi, social, olah raga dan sebagainya.⁴³

Pada tahun 1936, kegiatan Ikhwanul Muslimin mulai diperhatikan oleh pemerintah. Hassan Al Banna telah mengutus sepucuk surat kepada raja Faruk dan menteri-menterinya, menyeru mereka untuk menggantikan undang-undang Barat dan menjalankan undang-undang Islam.⁴⁴

Dari semua aspek kegiatan, Hassan Al Banna cukup menekankan masalah mendidik generasi muda di Mesir. Berulang kali Hassan Al Banna mendesak kerajaan untuk menyusun kembali kurikulum sekolah-sekolah yang ada

⁴² *Al-Ikhwān*, <http://www.al-ikhwan.net/index.php/al-ikhwan/> diakses tgl 26 April 2008

⁴³ *Ikhwanul Muslimin*, http://id.wikipedia.org/wiki/Ikhwān_Muslimin diakses tgl 15 April 2008

⁴⁴ Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran & Gerakan Pembaharuan dalam Islam*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 1998 hlm. 62

berdasarkan Islam. Mengharamkan sistem pendidikan campuran antara lelaki dan perempuan, Pelajaran sains juga mestilah dibersihkan dari paham materialistik.

Ruang lingkup dan pengaruh organisasi ini telah menyebar ke berbagai pelosok dunia, jauh dari tempat kelahirannya di Mesir. Para aktivis dan simpatisan Ikhwanul Muslimin telah menunjukkan kiprahnya dalam banyak kesempatan di berbagai belahan dunia. Mereka di pandang sebagai aktivias pergerakan yang radikal, dan karena hal itu, bagi sejumlah pemerintah sekuler, termasuk di tempat kelahirannya di Mesir pun Aktivis Ikhwanul Muslimin dipandang sebagai momok yang menakutkan.⁴⁵

Dengan semangat jihad dan sikap yang tidak kenal kompromi bila berkenaan dengan "*al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil mungkar*" pergerakan ikhwanul muslimin telah di cap sebgai kelompok muslim radikal. Dengan motto perjuangan "*Isy kariman au mut syahidan*" (hiduplah dengan cara terhormat atau matilah dengan atau syahid). Membuat mereka dipandang sebagai bagian dari kaum ekstremis yang tidak mengenal belas kasih. Meski demikian tak pelak gerakan mereka telah menggetarkan hati lawan-lawan mereka.⁴⁶

Pengaruh ini tetap bisa dirasakan di berbagai belahan dunia sampai sekarang termasuk di Negara kita sendiri. Artinya, orang-orang yang ingin membela agamanya dan menegakkan dakwah yang diyakininya sebagaimana yang dilakukan aktivia Ikhwanul Muslimin, terus menerus lahir dan bermunculan

⁴⁵ Mohamad Guntur Romli, *Membaca Kebangkitan Ikhwanul Muslimin*,
http://asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online=303 diakses tgl 25 april 2008

⁴⁶ Op.Cit hal 68

diberbagai belahan dunia. Rata-rata mereka tidak takut atau sebaliknya malah mencari mati syahid dalam mencapai tujuan tegaknya agama Allah dimuka bumi ini.

Karena itu betapa banyak aktivis Ikhwanul Muslimin yang kemudian menemui ajal, baik yang terbunuh di medan perang seperti misalnya di Palestina, Afganistan, dan Irak, maupun yang digantung sampai mati oleh penguasa yang menjadi musuh mereka. Dalam keadaan demikian tidaklah dapat dikatakan bahwa gerakan mereka adalah gerakan kaum ekstermis semata yang tidak mengenal belas kasih. Meskipun menurut ajaran agama mereka setiap perbuatan harus dibalas dengan perbuatan serupa, tetapi sikap memaafkan yang mereka ambil dari ajaran agama itu merupakan sikap yang tidak ada bandingnya.

Dalam sejarahnya Ikhwanul Muslimin telah memperlihatkan suatu ciri pergerakan yang sulit dicari tandingannya. Bermula dari suatu kelompok kecil di Ismailiyah, kemudian berkembang di Kairo sebagai suatu organisasi dengan anggota yang terbatas, gerakan ini kemudian berkembang di berbagai daerah di Timur - Tengah. Bahkan gagasan-gagasannya telah dipedomani oleh banyak pergerakan islam di berbagai belahan dunia.⁴⁷

Sikap, gaya hidup dan konsistensi para pemimpin dan aktivis dalam memperjuangkan cita-cita mereka, telah dijadikan suri tauladan, dan tidak habis-habisnya dikaji dan di turuti oleh banyak aktivis islam hampir di seluruh jagad.

⁴⁷ Wamy, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya)*, alih bahasa A. Najiyullah, Al-Islahy Press, Jakarta, 1993, hlm. 7.

Sebagai organisasi islam yang gerakannya selalu dicurigai oleh pihak penguasa, Ikhwanul Muslimin dalam waktu yang panjang bergerak di bawah tanah. Dalam situasi yang demikian, mereka tetap berhasil melakukan pembinaan terhadap kader-kadernya. Secara sangat cerdas, Al-Banna membentuk kelompok kecil beranggotakan 20 orang, yang kemudian di kenal dengan sebutan "Usroh" (keluarga), untuk membina kader-kadernya. Setidaknya ini adalah metode untuk menghindari sorotan mata penguasa. Ini tidak ubahnya dengan sistem sel model fasis dan Nazi.⁴⁸

B. POLITIK LUAR NEGERI MESIR

1.1. Sifat Politik Luar Negeri Mesir

Mesir termasuk Negara Arab yang memiliki peranan penting dan berpengaruh terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan usaha penyelesaian sengketa Arab-Israel yang berintikan masalah Palestina. Peran Mesir tersebut diwujudkan dengan cara berkabung dengan beberapa organisasi internasional, seperti Liga Arab (LA), Organisasi Konferensi Islam (OKI), Organisasi Persatuan Afrika (OPA), dan Gerakan Non-Blok (GNB). Mesir juga termasuk salah satu pemeriksa lahirnya organisasi-organisasi internasional tersebut. Menjadi anggota beberapa organisasi

⁴⁸ Loc.cit, Asmuni, hlm 65

internasional membuat Mesir dapat berperang aktif dalam berbagai urusan yang melibatkan kepentingan negara-negara anggotanya.

Geopolitik Mesir telah membentuk kebijakan politik luar negerinya. Mesir terletak di kawasan strategis baik sebagai jembatan daratan antara 2 benua dan penghubung antara 2 jalur laut, laut mediterania dan samudra Hindia. Maka dari itu Mesir mempunyai peluang untuk mendominasi lingkungannya atau menjadi resiko korban dari kekuatan di luar. Keamanannya juga bergantung pada sungai nil, yang perairannya dapat digunakan sebagai pertahanan. Maka dari itu, Nil mempunyai sejarah berimbang dengan Sudan dan telah terlihat hubungan yang baik dengan Negara-negara di Sudan bagian selatan, seperti Uganda. Jembatan ke asia, rute dengan potensi kekuasaan, juga harus tetap dijaga, dan hukum-hukum tradisional Mesir untuk mencoba proyek kekuatan mereka di Syria dan Arab, dan seringkali juga mencoba kekuatan mereka dengan Anatolia (sekarang ini dikenal Turkey), atau dengan jalan danau euphates (sekarang ini dikenal irak). Sekarang ini, Israel, didukung oleh superpower, dan terletak di bagian Mesir menghalangi jalanya/akses Mesir untuk ke timur, dan diduga sebagai ancaman terbesar bagi keamanan Mesir.

Mesir juga mamiliki strategi politik. Seperti yang dilakkukan Nasser, dengan mempertimbangkan keadilan, Mesir merupakan potensi pusat dari ketiga "ligkaran", Afrika, Arab, dan Islam. Mesir melihatnya sebagai pemegang permaianan di Afrika, dan disamping itu, sebgaai pemimpin yang lebih luas di bagian Negara dunia ketiga dan Negara dengan netral tanpa keberpihakan.



Geopolitik ini sangat penting karena akan membuat negaranya aman dari kepentingan Negara-negara dengan kekuasaan, dan pada saat Mesir telah cukup kuat, pada saat di bawah kepemimpinan Nasser, memungkinkannya untuk memainkan kekuatan/kekuasaannya untuk melawan satu sama lain dan memenangkan dukungan politik, ekonomi, dan militer dari semua bagian Negara. Bahkan saat terlemah Mesir dibawah Mubarak harus merembukkan strategi penting terhadap konflik Arab-Israel dan sebagai benteng pertahanan melawan aktivis politik Islam dan menjadikannya politik kerjasama dan bantuan ekonomi dari kedua pihak Barat dan dunia Arab.

Faktor kedua yang membentuk kebijakan politik luar negeri Mesir adalah karakter negara Islam Arab. Untuk lebih pastinya, Mesir memiliki sejarah panjang mengenai warisan Islam yang memberinya identitas yang sangat kental, dan pada masa seperti masa kepemimpinan Inggris mengembangkannya dan memisahkannya dari dunia Arab. Identitas nasional Mesir tidak pernah bergabung dengan perbedaan bangsa Arab; bangsa Mesir dibentuk dari sejarah mereka sendiri seperti geografi, sejarah, dialek, dan kebudayaan. Tetapi identitas bangsa Mesir tidak jauh dari Islam Arab.⁴⁹

Mesir merupakan bagian dari dunia Arab. Mesir merupakan Negara pengguna bahasa Arab terbesar dan intelektual dan pusat politik dimana Negara-negara Arab lainnya ingin mengikutinya demi masa depan negaranya. Mesir juga merupakan pusat peradaban Islam, memiliki Universitas Al-Azhar salah satu

⁴⁹ Riza Sihbudi, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, Bandung: PT. Eresco, 1993 hlm. 82

institusi agama Islam terbesar dan kebudayaan Islam yang terbesar yang pernah ditemukan. Walaupun demikian banyak dari Negara-negara barat melihat Mesir sebagai bagian dari mediterania atau pharaonic, untuk lebih pastinya Mesir adalah Negara Islam Arab.

Bahkan Mesir melihat dirinya sebagai pemimpin dunia Arab, dengan sebutan tersebut memegang peranan penting dalam mempertahankan konflik-konflik di Arab. Identitas Islam Arab tersebut merupakan asset besar bagi pemimpin Mesir. Memungkinkan Mesir untuk membuat hukum di Negara-neagra Arab, Mesir akan menyandang sebagai Negara Arab penghasil minyak, dan memberikannya kemampuan untuk membentuk kebijakan umum Arab, oleh karena itu akan meningkatkan strategi Negara-negara Arab dalam hubungan internasional.

Posisi pemimpin ini juga berarti bahwa Mesir adalah bagian dari keseimbangan kekuatan Arab, dimana Mesir selalu melibatkan dirinya baik itu dalam peperangan bangsa Arab maupun yang menyatukan bangsa Arab. Tahun 1950-an, modernisasi, musuh nasional Mesir adalah para Negara Arab yang melawan bangsa Barat seperti Irak dan Arab Saudi, dan yang hanya tertinggal sebagai sekutu Mesir adalah Syria. Tahun 1970-an, semua sekutu Mesir, Syria dan Arab Saudi membiarkan bangsa arab mencari perdamaian mereka dengan kehormatan; ketika Sadat membuat perdamain terpisah Syria menjadi musuh utama Mesir. Negara-negara Islam Arab juga memberikan paksaan terhadap

pembuat kebijakan politik luar negeri untuk melanggar kebijakan tersebut dalam kekuasaan semua rezim.

Terakhir, kebijakan politik luar negeri Mesir adalah kebalikan dari bangsa barat dengan idealisme anti-imperialisme tidak disejajarkan dan keluar dari jeratan ketergantungan dengan negara barat yang selama ini terus berlangsung. Sejarah panjang Mesir dibawah kepemimpinan hukum bangsa asing, khususnya imperialisme Eropa, membentuk mesir untuk tidak mejadi bawahan, kebencian akan imperilisme, menjaga martabat negaranya, dan di bawah kepemipannya Nasser terbentuk kekuatan nasionalisme diantara bangsa Mesir.⁵⁰

Idealisme Mesir adalah menjadi Negara merdeka dan tidak tergantung dengan kedua negara baik itu barat maupun timur, menjadi Negara yang makmur, untuk bertahan dari Israel, dan untuk memimpin dunia Arab. Belum lagi, sebagai Negara berkembang yang terkena taraf kemiskinan dan sbgai aktor Negara yang baru di dalam permainan kekuatan dunia internasional, mesir tidak dapat melakukannya tanpa bantuan besar ekonomi dan militer dari Negara dengan kekuatan ekonomi dan militer yang lebih maju.

Namun ketergantungan seperti itu, tentu saja menjadi beban dan ancaman bagi kemerdekaan nasional. Masalah ketergantungan seperti ini dapat diminimalis dengan menggolongkan sumber bantuan, dan permulaannya Nasser mengejar kebijakan dengan menyeimbangkan antar Timur dan Barat, dimana mendapatkan

⁵⁰ *Egypt Foreign Policy*,
http://www.photius.com/countries/egypt/government/egypt_government_foreign_policy.html,
diakses tgl 3 Maret 2008

bantuan dari kedua pihak dan meminimalis ketergantungan penuh terhadap satu pihak saja.

Amerika Serikat mendukung Israel setelah perang Juni 1967 membuat Mesir harus bergantung pada Uni Soviet untuk bantuan militer dan perlindungan, tapi dengan ketergantungan ini didukung oleh bantuan keuangan dari Negara Arab yang bersumber dari minyak. Pada akhir 1970-an, Sadat memilih kembali bergantung kepada diplomasi Amerika untuk memulihkan Negara Mesir dari Israel dan terpaksa menyimpang dari Uni Soviet dan dunia Arab menyebabkan hubungannya dengan kedua Negara tersebut menjadi buruk, dan hal ini menyebabkan Mesir harus bergantung penuh kepada bantuan ekonomi dan militer Amerika.⁵¹

Ketergantungan ini, dibuat untuk menghindari kebijakan polugri yang tidak menyenangkan bagi Israel dan Washington, dan ini menyebabkan keterbatasan Mesir untuk mendapatkan statusnya sebagai bangsa Arab dan kebijakan polugri yang merdeka/betul-betul dari negaranya sendiri. Jadi permasalahan dasar dari kebijakan polugri Mesir adalah masih tergantungnya keputusan yang diambil oleh Negara asistennya/sekutunya yang tidak berkesinambungan/bertabrakan dengan pemikirannya untuk kemerdekaan nasionalnya dan statusnya sebagai Negara Islam Arab dan sejarah kesatuan bangsa yang sama.

⁵¹ Ibid

Berikut ini adalah perkembangan politik luar negeri dan hubungan internasional Mesir pada masa pasca revolusi 1952 yang dibedakan dalam 3 zaman kepemimpinan, yaitu:

Periode Nasser

Setelah Nasser berkuasa, dia berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan AS. Salah satu harapannya adalah mendapat peluang untuk membeli persenjataan bagi modernisasi tentara Mesir untuk menggantikan persenjataan yang sudah sangat usang. Namun, harapan itu tidak terpenuhi, karena AS hanya mau memenuhinya jika Mesir mau bergabung dengan blok anti komunis dibawah pimpinan AS. Prasyarat AS itu telah mengecewakan Nasser yang sangat membutuhkan sumber bantuan untuk memodernisir kondisi angkatan bersenjata yang persenjataannya sudah usang.

Sejak saat itu, Nasser mengalihkan perhatiannya pada sumber persenjataan lainnya, mulai dari Chekoslowakia hingga akhirnya Uni Soviet. Pada waktu periode Nasser itulah angkatan bersenjata Nasser diperlengkapi dengan persenjataan dari Uni Soviet. Peristiwa ini bias dianggap sebagai permulaan beralihnya orientasi Mesir ke "Timur". Walaupun Mesir tidak menghendaki pengaruh komunisme menjalar ke dalam negerinya namun hubungan dengan Uni Soviet berkembang luas ke berbagai bidang, dan makin menjauhkan Mesir dari kubu AS. Puncak kejayaan hubungan antara Mesir dengan Uni Soviet

dilambungkan oleh peresmian selesainya pembangunan Bendungan Aswan (1964).⁵²

Dalam rangka pembangunan dunia Arab yang bersatu, Nasser mengembangkan gagasan Pan-Arabisme. Mesir bersama beberapa Negara Arab lain memprakarsai dibentuknya Negara Arab (Alexandria, Maret 1945). Liga ini mempunyai standing committees, diantaranya adalah yang dikhususkan untuk bidang politik. Di samping itu Liga Arab membentuk beberapa councils, seperti menyangkut bidang ekonomi dan pertahanan, serta membentuk badan khusus, seperti Arab Labour Organization, Arab Postal Union, Arab Telecommunication Union. Semua ini menggambarkan suatu tahap baru dalam kebangkitan Arab sebagai bangsa tanpa meniadakan identitas tanah air masing-masing.

Kejayaan Nasser mengalami kemunduran akibat kekalahan Mesir dalam perang 6 hari (1967) yang berakibat didudukinya wilayah Mesir (Semenanjung Sinai) oleh Israel. Perang ini disebabkan karena ketidakpuasan orang Arab atas kekalahan mereka dalam perang Arab-Israel pada tahun 1948 dan 1957. orang-orang Arab tetap tidak bersedia mengakui keberadaan Negara Israel dan ingin menghancurkan Israel.

Periode Sadat

Anwar Sadat diangkat menjadi Presiden sebagai pengganti Nasser. Tidak lama sesudah diangkat sebagai Presiden, Sadat melakukan gerakan "Pembersihan"

⁵² *Egypt Diplomacy*, <http://vitasymesir.wordpress.com/weekly-news/> diakses tanggal 04 Maret 2008

terhadap Anasir "Sayap kiri" yang pro Uni Soviet. Seiring dengan tindakan itu, Sadat segera melancarkan kebijaksanaan yang infitah (pintu terbuka) sebagai permulaan Liberalisasi dibidang Ekonomi. Hal ini mendapat tentangan keras dari golongan Nasser (Sosialisme Arab) yang berorientasi kerakyatan dan didukung oleh mahasiswa dan kaum buruh. Lieberalisasi Ekonomi dianggap hanya akan menguntungkan golongan kelas menengah dan orang kaya baru saja. Sedangkan Sadat berpendapat bahwa sulit bagi Mesir untuk memperbaiki kondisi Ekonomi dalam negerinya tanpa membuka pintu untuk investasi modal asing. Menghadapi tantangan dari dalam negeri itu Sadat bertindak hati-hati dan terpaksa tetap melanjutkan hubungan dengan Uni Soviet walaupun tidak seerat pada masa Nasser.

Pada bulan Oktober 1973, Sadat melancarkan serangan terhadap Israel. Perang yang di Mesir terkenal dengan sebutan perang Ramadhan ini membuat nama Sadat menjulang, karena tentara Mesir berhasil menyeberangi terusan Suez dan menghancurkan benteng pertahanan Israel Lini Barlev yang dibangun dengan saat kuat sehingga dianggap tidak mungkin ditembus oleh serangan musuh. Peperangan yang oleh Sadat ditegaskan sebagai "Limited Confrontation" memang tidak berakhir dengan kemenangan dipihak Mesir. Tetapi, tujuan Sadat untuk melibatkan AS dalam usaha penyelesaian sengketa Arab-Israel tercapai. Sadat beranggapan bahwa hanya AS yang bias mendorong Israel untuk melaksanakan perundingan perdamaian. Dengan perang Oktober ini, Sadat tidak hanya berhasil

menyeret AS ke dalam usaha penyelesaian sengketa Ara-Israel, melainkan juga Uni Soviet dan sejumlah Negara Eropa.

Periode Mubarak

Selama 6 tahun menjabat sebagai wakil Presiden, Husni Mubarak terkenal sebagai pendukung penuh kebijaksanaan politik Sadat, termasuk pelaksanaan politik luar negerinya dan khususnya usaha Sadat untuk mengakhiri berlarutnya masa "No war, No peace" dengan Israel.

Pada awal masa jabatannya, Mubarak lebih mencurahkan perhatian pada usaha memperbaiki perekonomian dalam negerinya dengan jalan melanjutkan kebijaksanaan pintu terbuka yang sudah dirintis oleh Sadat. Perbaikan aparatur birokrasi menjadi prioritas utama, khususnya untuk menciptakan iklim yang baik bagi penanaman modal asing. Dalam usaha perbaikan perekonomiannya, Mubarak menerima bantuan Ekonomi dan Keuangan yang cukup besar dari AS, antara lain pemutihan hutangnya. Sadat mewariskan kepada Mubarak untuk memimpin Mesir yang terisolasi dari dunia Arab dan terpuruk perekonomiannya, karena dibekukannya bantuan keuangan yang selama ini diterima dari sumber Arab. Hal ini membuat Mubarak terpaksa berpaling kepada AS sebagai sumber bantuan utama, inipun sampai batas waktu tertentu yang mengikat Mubarak dalam pelaksanaan politik luar negerinya, terutama mengenai konflik Arab-Israel.⁵³

⁵³ *Foreign Relations of Egypt*, <http://en.wikipedia.org/wiki/foreign-relation-of-egypt>, diakses 3 Maret 2008

Salah satu usaha Mubarak yang tampak berjalan mulus adalah usahanya untuk memperbaiki hubungan Mesir dengan Uni Soviet yang merenggang sejak dipulangkannya kembali penasihat militer Uni Soviet dari Mesir. Dengan ditingkatkannya pertukaran kunjungan pejabat tinggi antara kedua Negara itu, akhirnya hubungan Mesir-Uni Soviet pulih kembali, walaupun tidak seakrab sebelum perang Oktober 1973. Usaha Mubarak untuk mengembalikan keseimbangan hubungan Mesir dengan AS, dan Uni Soviet tampaknya cukup berhasil. Selain itu, Mesir juga meningkatkan hubungannya dengan Negara-negara anggota OPA dan OKI.

Berbagai peristiwa penting di wilayah Timur Tengah ternyata memudahkan Mesir untuk memulihkan citranya sebagai aktor politik yang tidak bisa diabaikan perannya. Mubarak melanjutkan dukungan Mesir terhadap Irak dalam perang Irak-Iran (1980-1988). Inplasi Israel ke Libanon ditentang keras oleh Mubarak dan mengakibatkan merenggangnya kembali hubungan Mesir dan Israel.

1.2. Substansi Politik Luar Negeri Mesir

Kebijakan politik luar negeri Mesir pada masa Mubarak ke-4, pada tanggal 26 September 1999, lima hari sebelum isu-isu dipublikasikan/diberitakan, bahwa akan diadakan pemilu dan untuk keempat kalinya nominasi Presiden Hosni Mubarak kembali terpilih sebagai presiden. Seperti yang telah diharapkan, mayoritas rakyat Mesir mengatakan "ya" bagi Mubarak untuk masa kepresidenan

hingga akhir 2005, menjadikan masa jabatan yang dipegangnya sebagai presiden terlama dalam sejarah Mesir.

Sifat Mubarak yang tidak otoriter membuatnya berhak mendapatkan penghargaan atas kebijakan-kebijakannya, yang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari di segala bidang masyarakatnya. Bukti nyata penghargaannya termasuk menciptakan kesempatan kerja melalui proyek besar nasional, meningkatkan taraf hidup, dan meningkatkan segala sektor seperti perumahan, perairan, listrik, komunikasi, dan jalanan.

Seperti yang diharapkan bahwa isu-isu domestik akan menjadi fokus utama pembicaraan selama perkembangan periode pemilu sebelumnya. Fokus terhadap isu-isu domestik adalah tugas utama dari legislatif dan kampanye presiden di seluruh dunia. Bagaimanapun, hal ini tidak berarti menggambarkan perbedaan antara kebijakan luar negeri dan dalam negeri Mubarak yang keduanya, pada hakikatnya, sangat berkaitan.

Kebijakan luar negeri, tidak sama dengan kebijakan dalam negeri, dimana area itu mencakup konflik antara pemerintahan dan lawan oposisinya. Hal utama dalam kebijakn luar negeri Mubarak adalah peningkatan/pengakuan oleh mayoritas atas kekuatan politik yang tidak dianggap dari para politik-politik yang memimpin. Hal ini sangat diharapkan bahwa hal dasar dari kebijakan Mesir yang terus diperjuangkan selama 18 tahun, akan terus dilanjutkan pada masa jabatan ke empat kalinya Mubarak.

Hal utama dalam kebijakan politik luar negeri Mubarak sangat berhubungan dengan kepentingan ekonomi nasional; ini tidak berhubungan dengan penghargaan yang abstrak untuk kebaikan propaganda. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kepentingan utama Mesir, yaitu kepentingan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat biasa Mesir. Para ekonom dan bisnisan/pengusaha telah memainkan peran utama dalam hubungan luar negeri dan telah disepakati bahwa mereka telah menjadi delegasi Mesir yang menemani presiden disetiap kunjungannya di luar negeri.

Bukti-bukti atau jejak-jejak utama dalam kebijakan politik luar negeri Mesir sejak 1922 telah menunggalkan kemerdekaan di hadapan pemilik kekuatan/superpower dan musuh-musuh luar negeri, sahnya pada revolusi july 1952. Sejak tahun 1990-an, telah terjadi perubahan drastis dalam dunia perpolitikan, dengan berakhirnya sistem bi-polar dan kejatuhan Uni Soviet dan blok komunis. Hal ini tentu saja telah mempengaruhi Mesir untuk menerima dan mempelajari politik luar negeri mereka lagi, walaupun demikian mereka tidak terpengaruh dengan nilai yang hancur tersebut.⁵⁴

Diplomasi dan politik luar negeri Mesir berlanjut dengan tujuan untuk menggabungkan hukum regional Mesir dan Internasional. Mesir adalah salah satu dari banyak Negara yang hukum luar negerinya berhasil melebihi Negara lain dalam hal kemanusiaan dan potensi alam. Hal ini dapat dihubungkan dengan

⁵⁴ *Politik Luar Negeri Mesir*,
<http://www.chebonk.blogspot.com/2007/11/politik-luar-negeri-mesir.html>, diakses tanggal 28 Mei 2008

sejarah panjang mesir, posisi geografisnya, dan penyatuan kebudayaan Timur dan Baratnya. Mesir juga telah sukses dalam menyatukan tradisional dan modern dan menghilangkan kekerasan, fanatik, dan ekstrimisme dan meningkatkan toleransi dan moderasi.

Karakteristik ini mencerminkan beberapa aspek utama dari politik luar negeri Mesir. Lebih lagi salah satu dari keinginan besar Mesir adalah untuk menyatukan proses perdamaian Arab-Israel. Hal ini tidak sepadan dengan kekuatan yang diterima Mubarak pada tahun 1981, yaitu pada masa setelah dua tahun di mana penandatanganan perjanjian perdamaian mesir-israel dan sebelum Israel menarik pasukannya dari Sinai. Karena perjanjian tersebut, muncul dampak kekerasan dari Arab terhadap mesir yang pada waktu itu sekelompok Arab memboikot Negara Mesir. Maka dari itu, Mubarak, harus memimpin diplomasi dan politik luar negeri mesir pada 2 jalur yang sama. Menghargai perjanjian yang telah disepakati dan komitmen untuk menyelesaikan proses perdamaian, sementara pada saat yang sama penggunaan kebijakan akan menghasilkan peningkatan hubungan Arab-Mesir.

Strategi ini berhasil dan, pada April 1982, Mubarak mengembalikan Sinai ke Mesir dan Israel menarik mundur pasukannya. Mesir kemudian mengalami masa peran dingin dengan Taba, dimana berakhir pada 29 september 1987, Mesir sangat memegang janjinya kepada Israel, menyelesaikan proses perdamaian dan maningkatkan keinginan masyarakat dan rakyat Mesir.



Mubarak mulai memisahkan antara hubungan perdamaian Mesir dengan Israel dan penghukuman atas kekerasan dan agresi militer yang dilakukan oleh Lebanon dan palestina sejak tahun 1980-an. Dia menyukseskan membangun hubungan baik dengan negara arab dan membangun liga arab yang markasnya berada di kairo, menjelaskan sebuah rekonsiliasi/pembanguanna era baru di Arab.

Tahun 1990, irak menginvasi Kuwait menghancurkan harapan persatuan Negara-negara arab dan menimbulkan kekurangan persatuan dari kepemimpinan arab. Belum lagi para pejabat organisasi dalam tugasnya hubungan internasional memulai kembali proses perdamaian arab-israel, sesuai dengan phasil pertemuan perjanjian perdamaian Madrid 1991.

Sejak saat itu, Mesir kemudian menanggung beban tanggung jawab atas jalannya proses perdamaian. Bahkan setelah perjanjian oslo 1993 antara Israel dan Organisasi Liberasi Palestina (PLO) dan perjanjian perdamaian Jordania-Israel 1994, Mesir terus menerus menerima hasilnya-walaupun perdana menteri Israel Binyamin Netanyahu menjalankan politik negatifnya-pada semua proses perdamaian. Diplomasi mesir menyambut perdana menteri Israel Ehud barak dan menjanjikan kemenagnan dan untuk menjalankan perjanjian Wye River.⁵⁵

Tujuan utama kedua dari politik luar negeri Mesir adalah untuk mempertahankan hubungan baik dengan Amerika Serikat, sesuai dengan prinsip persamaan dibandingkan dengan kepercayaan namun tidak menyerahkan kedaulatan Mesir terhadap keputusan yang diambilnya. Hubungan semacam ini

⁵⁵ Musthafa Abd Rahman, *Masa Depan Demokrasi di Mesir*, Harian Kompas, 30 September 2007

terlihat lebih masuk akal antar kekuatan regional timur tengah dengan Negara superpower yang berada di atas dunia dan hal ini saling digiatkan dengan kerjasama antara kedua Negara vital di kedua bagian regional.

Selama masa kepresidenan Mubarak, terdapat bermacam-macam opini antara dua sisi, pada isu-isu seperti pembangunan nuklir di timur tengah dan di seluruh dunia, hasil proses perdamaian dengan Israel, dan kebijakan mesir terhadap Libya, irak, dan sudan. Bagaimanapun, ketidak setujuan perjanjian tersebut menyoroti keberhasilan kebijakan polugri Mesir. Hal ketiga yang terpenting dari kebijakan politik luar negeri Mesir adalah berjuang melawan teroris dan kekerasan dan panggilan perdamaian. Kedua hal ini sepertinya menjadi hal yang utama dari pemikiran Mubarak, segera menyingkirkan timur tengah dari senjata nuklir dan pangkalannya untuk mengkordinasi dampak dari teroris internasional.

Walaupun inisiatif belakangan ini telah diterima oleh AS dan dunia, hubungan spesial dibangun dengan AS dan Israel menempatkan banyak pendukung di jalan-jalan atas penghentian penambangan nuklir di area regional. Mesir melihat bahwa kebijakannya telah menjadi dua kali lipat berkembang dimana menolak kekerasan dan meningkatkan perasaan tekanana pada dunia brkembang. Kebijakan politik luar negeri pada masa Mubarak telah betul-betul berkembang dan sepertinya akan terus berkembang, dan mencuri perhatian area yang dulunya diluar kepentingan konvensional. Kebijakan politik luar negeri Mesir pada tahun 1950-an, dibawah kepemimpinan Gamal Abdul Nasser, memfokuskan pada Arab,

Afrika, dan masalah Islam. Tapi pada tahun 1980-an dan 1990-an, Mesir kemudian mulai fokus pada daerah-daerah baru, termasuk Asia dan Mediterania.⁵⁶

Ketertarikan akan Asia diresponi karena perkembangannya yang signifikan, khususnya hukum-hukum politik internasional di Cina dan perkembangan dampak ekonomi di Jepang, India, dan Macan Asia. Kepentingan pada kawasan Mediterania karena menerima tantangan kedepan untuk kerjasama regional. Di dalam dunia perekonomian kelompok yang selalu berkembang, sangat tak terelakkan bahwa nantinya akan ada perjanjian antara negara utara dan selatan Mediterania.

Dalam hal ini, kelanjutan dari kebijakan politik Mesir dibawah kepemimpinan Mubarak sangat diperlukan untuk mendapatkan kepentingan dari masyarakat Mesir dan kesadaran akan keinginan mereka untuk kedepannya dan kemapanan.

⁵⁶ *Foreign Relations of Egypt*,
<http://en.wikipedia.org/wiki/foreign-relation-of-egypt>, diakses 3 Maret 2008

BAB IV ANALISA HASIL PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Gerakan Ikhwanul Muslimin Dengan Pemerintah Mesir

Bagi Ikhwanul Muslimin, pemahaman umum yang menyeluruh tentang Islam mencakup seluruh sektor pada diri umat, sehingga siapapun yang memiliki keikhlasan dan semangat dalam membela Islam dapat disalurkan melalui aspirasi dan cita-cita yang diusung pada setiap dakwah ikhwan. Ikhwanul Muslimin menuntut reformasi dan perbaikan terhadap hubungan umat Islam dengan umat lainnya secara internasional, membina bangsa dan untuk memiliki harga diri, dan kemuliaan serta memelihara persatuan bangsa secara maksimal.

Secara tersirat identitas gerakan Ikhwanul Muslimin tidak menggambarkan sebagai perkumpulan tariqah shufiyah, organisasi kebajikan, yayasan sosial, ataupun partai politik, gerakan ini menekankan dakwah kepada Al-Qur'an secara menyeluruh, dan menyatukannya dalam satu karakter yaitu hakekat shufiyah sunniyah untuk memperbaiki jiwa dan mensucikan ruh, menghidupkan hati manusia kepada Allah Yang Maha Tinggi dan Besar. Organisasi kebajikan yang memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran, menolong orang yang tertimpa musibah, membantu orang miskin, dan mendamaikan orang-orang yang berselisih. Yayasan sosial yang berjuang memerangi kebodohan, kemiskinan, penyakit dan berbagai bentuk kehinaan. Partai politik yang bersih yang

mengumpulkan pendapat, terlepas dari ambisi, mempertajam tujuan dan memperbaiki pimpinan.⁵⁷

Gerakan Ikhwanul Muslimin hingga kini terus melakukan berbagai kegiatannya. Para simpatisan, pendukung dan para kadernya tersebar di berbagai wilayah di seluruh dunia. Mereka melakukan kegiatan dakwahnya dengan berpedoman kepada berbagai arahan dan pemikiran yang ditelurkan oleh pemikir besar Ikhwanul Muslimin sekaligus pendirinya, Imam Syahid Hasan Al-Banna.

Meski jamaah ini lahir dalam kurun waktu yang cukup lama, semangat perjuangannya masih saja ada dan berkembang. Ada nilai-nilai universal yang selalu diperjuangkannya, misalnya keterbukaan, keadilan, *clean government*, dan sebagainya. Hal ini juga yang memicu Ikhwanul Muslimin untuk turut terlibat dalam perpolitikan di Mesir. Lebih khusus lagi Ikhwanul Muslimin sejak semula menggaungkan perjuangan nilai-nilai dakwah Islam, yang menjadi penting untuk dikaji oleh masyarakat akademisi dan lembaga-lembaga dakwah.⁵⁸

Menurut John L. Posito, pada awalnya gerakan Ikhwanul Muslimin bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Beberapa kegiatannya antara lain adalah pendirian poliklinik, masjid, sekolah, pabrik, pemberantasan buta huruf, publikasi kitab agama, serta penerbitan harian dan majalah. Lambat laun, gerakan Ikhwanul Muslimin mulai masuk ke dalam masalah-masalah politik. Dimulai dengan turut sertanya beberapa aktivis Ikhwanul Muslimin dalam perang Arab-Israel tahun 1948,

⁵⁷ Najiyullah, A, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran; Akar Ideologis dan Penyebarannya* (terj), Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 2002 hal. 18

⁵⁸ Loc.cit. Sihbudi, hal. 84

setelah sebelumnya digembleng dengan latihan-latihan kemiliteran. Hingga pasca perang dunia II, Ikwanul Muslimin dikenal sebagai organisasi politik yang militan dan aktif menentang pemerintahan sekuler Mesir.⁵⁹

Perjalanan Ikwanul Muslimin penuh dengan hambatan dan tantangan khususnya dari Pemerintah Mesir, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perjalanan Ikwanul Muslimin. Tahun 1948 menjadi tahun yang penting dan genting dalam sejarah Ikwanul Muslimin. Pada bulan November tahun tersebut, Perdana Menteri Fahmi Naqrasy membekukan Ikwanul Muslimin, menyita aset-asetnya dan menangkap para tokohnya. Ikwanul Muslimin menjadi organisasi terlarang pada saat itu.⁶⁰

Pada bulan Desember 1948, terjadi peristiwa besar di Mesir. Perdana Menteri Fahmi Naqrasy diculik dan dibunuh. Orang-orang Ikwanul Muslimin dituduh sebagai pelaku penculikan tersebut. Ketika mengusung jenazah Naqrasy, para pendukungnya berteriak: "*Kepala Naqrasy harus dibayar dengan kepala Hasan Al-Banna*". Pada tanggal 12 Februari 1949, Hasan Al-Banna terbunuh secara misterius. Menurut beberapa keterangan, pembunuhan tersebut sangat terencana dan sistematis. Sehingga banyak pendapat bahwa Hasan Al-Banna memang sengaja dibunuh oleh kalangan militer atas perintah Raja Faruk.⁶¹

⁵⁹ Ibid, hal. 25

⁶⁰ Loc.cit, Mahmud, hal. 41

⁶¹ Mahmud, Ali Abdul Alim, Metode Pendidikan Ikhwanul Muslimin (terj), Jakarta: Gema Insani Pers, 1997, hal. 15



Sepeninggal Hasan Al-Banna, pada tahun 1950, Hasan Hudaibi (1306-1393H/1891-1973 M) yang terkenal sebagai tokoh kehakiman Mesir, terpilih menjadi *Mursyid 'Am* Ikwanul Muslimin. Selanjutnya pada tahun tersebut berdasarkan keputusan Dewan Tertinggi Negara, Ikwanul Muslimin direhabilitasi. Dewan tersebut juga memutuskan bahwa pembekuan Ikwanul Muslimin selain tidak sah, juga inkonstitusional. Ketika itu Mesir sedang diperintah oleh Kabinet Al-Nuhas.

Pada tahun 1952, terjadi revolusi di Mesir, selanjutnya lebih dikenal dengan dengan "Revolusi Juli" pimpinan Gamal Abdul Nasser yang mengakhiri kekuasaan Raja Faruk sekaligus mengakhiri sistem pemerintahan monarki. Sejak saat itu hingga sekarang, Ikwanul Muslimin dan pemerintah Mesir terlibat konflik yang kian hari kian menajam. Ikwanul Muslimin sering dituduh sebagai gerakan yang ingin mendongkel pemerintahan. Puncaknya, pada tahun 1954, Ikwanul Muslimin dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Mesir, setelah sebelumnya Ikwanul Muslimin dituduh melakukan upaya pembunuhan terhadap Presiden Gamal Abdul Nasser. Untuk selanjutnya pemerintah Nasser melakukan penangkapan besar-besaran terhadap anggota Ikwanul Muslimin dan ribuan aktivisnya dijebloskan ke penjara. Enam diantaranya dihukum mati, yaitu Abdul Qadir Audah, Muhammad Farghali, Yusuf Thal'at, Handawi Dhuair, Ibrahim Thayyib dan Muhammad Abdul Latif.⁶²

⁶² *Geliat Reformasi dan Peta Kekuatan Politik di Mesir*, Harian Kompas, 29 September 2007

Upaya pemerintah Nasser untuk melumpuhkan Ikwatul Muslimin ternyata tidak berhenti pada saat itu. Sepanjang tahun 1965-1966 Pemerintah kembali melakukan penangkapan. Tercatat ada tiga orang yang dihukum gantung, yaitu Yusuf Hawasi, Abdul Fatah Ismail dan Sayyid Qutb, seorang ideolog Ikwatul Muslimin terkemuka dan disebut-sebut sebagai pemikir Ikwatul Muslimin nomor dua setelah Hasan Al-Banna.

Sejak saat itu, Ikhwan bergerak secara rahasia atau menjadi gerakan bawah tanah sampai Gamal Abdul Nasser meninggal dunia pada tanggal 28 September 1970. Sepeninggal Nasser, yaitu ketika pemerintah Anwar Sadat berkuasa, aktivis Ikwatul Muslimin yang dipenjarakan mulai dibebaskan secara bertahap. Namun demikian, kekritisian sikap mereka terhadap setiap bentuk penyelewengan pemerintah tetap tidak berubah. Diantara bentuk kekritisian itu adalah pada pasca perang Arab-Israel, melalui perjanjian Camp David (1979). Sejak saat itu, konfrontasi antara Ikwatul Muslimin dan pemerintahan Anwar Sadat kembali menghebat. Puncaknya adalah saat Sadat terbunuh pada tanggal 6 Oktober 1981, pemerintah kembali menuduh Ikwatul Muslimin berada di balik pembunuhan tersebut.

Ikwatul Muslimin bergerak dengan strategi yang bisa menjauhkan mereka dari konfrontasi atau bentrokan dengan pemerintah. Dalam banyak kesempatan ia sering mengulang-ulang seruanya "*Bergeraklah dengan bijak dan hindarkanlah kekerasan dan ekstrimisme.*" Tahun 1965-1966 bentrokan antara Ikhwan dan pemerintah Mesir terulang kembali untuk kedua kalinya. Pemerintah kembali

melakukan penangkapan besar-besaran, melakukan penyiksaan serta memenjarakan anggota Ikhwan Sayyid Quthb pada tahun 1906-1966.⁶³

Ia termasuk pemikir Ikhwan nomor dua setelah Hasan al-Banna. Dan termasuk salah seorang tokoh islam di zaman modern ini. Ditangkap tahun 1954 M dan disekap di dalam penjara selama 10 tahun. Tahun 1964 ia dikeluarkan dari penjara atas desakan presiden Irak Abdussalam Arif. Namun tak lama kemudian ia diculik kembali untuk menghadapi hukuman mati. Hingga Gamal Abdul Naser meninggal dunia Ikhwan bergerak secara rahasia, dan ketika Anwar Sadat berkuasa orang-orang ikhwan mulai di lepas secara bertahap sejak saat itu, ikhwan menuntut hak-hak jama'ah secara utuh dan mengembalikan milik jama'ah yang dibekukan oleh Gamal Abdul Nasser.

Melihat sejarah perkembangan Ikhwanul Muslimin hubungannya terhadap pemerintah Mesir mengalami pasang surut, hal ini dapat dilihat dari pemimpinnya pada masa itu, ada yang langsung menyatakan ketidak setujuannya atas gerakan ini dan ada yang pada awalnya saja, hingga dapat menjadi bagian dalam pemerintah Mesir. Pada era Hasan Al-Banna Ikhwanul Muslimin memulai aktivitasnya dengan melakukan dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga terbangun jaringan antar jamaah di pelosok Mesir. Pada saat itu gerakan ini tidak begitu menonjol dalam bidang politik hal ini dikarenakan ingin memfokuskan pada tujuan utama dari gerakan ini yaitu menyebarkan dakwah islam sejati.

⁶³ Ibnu Abdul Muis, *Mengenal Ikhwanul Muslimin*,
<http://ihwansalafy.wordpress.com/2007/09/24/mengenal-ikhwanul-muslimin/>

Berbeda dengan Ikhwanul Muslimin pada era Hasan Al-Banna yang menonjolkan aktivitas sosial dan menghindari konfrontasi langsung dengan kekuasaan. Pada masa-masa berikutnya Ikhwanul Muslimin bersikap lebih kritis dan dan oposan hal ini dipicu oleh sikap pemerintah yang berkuasa lebih refresif terhadap keberadaan Ikhwan. Hal ini dimulai dari peristiwa pemilihan parlemen pada tahun 1945 dan Ikhwanul Muslimin sebagai salah satu kontestas pemilu dimana tidak mendapat satu kursi pun lantaran rezim Gamal Abdul Nasser berlaku curang, hingga pemilihan umum yang terakhir pada tahun 2005 Ikhwanul Muslimin berusaha untuk terus mengambil bagian dalam politik di Mesir.

B. Pengaruh Ikhwanul Muslimin Terhadap Polugri Mesir

Munculnya tindak kekerasan di negara-negara Islam (Arab), selalu dikaitkan dengan Ikhwanul Muslimin, minimal muncul dua sikap ikhwan dalam menghadapi kenyataan itu. Pertama, sikap menolak. Kedua, sikap menerima dengan reserve. Sikap pertama didasari pada kenyataan bahwa pemerintah yang mendapat kekuasaan dengan cara yang tidak sah. Di antara mereka, ada yang menolaknya dengan vokal, yang disertai dengan perencanaan untuk meluruskan jalannya. Dan ada yang menolaknya dengan sikap pelarian diri kepada pengkajian masalah-masalah Islam dan menghindari hal-hal yang membawa bentrokan dengan pemerintah.

Sikap kedua adalah menerima pemerintahan sebagai kenyataan. Sekalipun tidak melambangkan citra Islam politik, minimal ia telah mampu mempesatukan

umat di bawah sebuah negara yang berdaulat. Ia juga tidak melarang umat untuk meyakini rukun iman dan menjalankan rukun Islam yang lima. Perangkat-perangkatnya selama berabad-abad diisi oleh sayap kedua dari sikap pertama, yaitu pihak yang menyibukkan diri untuk mengembangkan warisan agama dan intelektual Islam dengan menjauhi konfrontasi langsung dengan pemerintah yang berkuasa.

Aliran pertama yang bersifat vokal dan bahkan mengikutsertakan gerakan di bawah tanah untuk menyusun kekuatan dalam rangka membentuk sebuah pemerintahan yang lebih Islami, banyak mendapat kesulitan dari pemerintah yang berkuasa. Tokoh-tokohnya diburu-buru dan ajarannya ditolak. Inilah cikal bakal pergerakan Islam yang mempunyai pendukung sepanjang sejarah Islam sampai ke abad modern. Organisasi Ikhwanul Muslimin adalah sebuah pewaris dari Islam yang bergerak sesuai dengan bentuknya yang khas di zaman modern.

Politik pemerintah semakin cenderung untuk memelihara kepentingan Barat. Terusan Suez sebagai jalan perhubungan penting antara Barat dan Timur berada di tangan asing. Di Palestina kekuatan Zionis internasional semakin mengkrystal untuk mendirikan negara nasional Yahudi yang mengancam eksistensi umat Islam dan bangsa Arab. Sementara itu, para penguasa Arab lebih banyak membuat kebijakan yang dapat mempertahankan kepentingan mereka daripada kepentingan rakyat. Di pihak lain, Al-Azhar sebagai lembaga keagamaan tertua di dunia Islam bersikap melemah dan sulit untuk dijadikan panutan bagi sebuah pembaruan yang sejalan dengan semangat Islam.

Sebagai organisasi pergerakan, Ikhwan tak mau membiarkan kondisi yang tidak sejalan dengan tuntutan Islam itu berjalan terus. Melalui media dan sarana yang dimilikinya (surat kabar, majalah, pamflet, surat terbuka, pidato, khutbah, rapat umum dan lain-lain), organisasi ini memberikan imbauannya kepada rakyat dan pemerintah agar mengambil garis Islam dalam semua kebijakan. Kalau kemudian pemerintah melihat Al-Ikhwan sebagai ancaman, bukan semata karena imbauan kebaikan itu, tapi lebih karena sebagai organisasi massa, Al-Ikhwan dapat memaksakan kehendaknya. Usaha yang dilakukannya bukan hanya bidang penerangan, pendidikan dan kebajikan semata, tetapi juga mencakup usaha-usaha ekonomi yang menjadi urat nadi organisasi, latihan bela diri dan bahkan pasukan militer. Dalam perang melawan sekutu Inggris-Israel pada tahun 1948, misalnya, pasukan sukarelawan Ikhwan terbukti tangguh dalam mematahkan kekuatan musuh.⁶⁴

Sekitar Perang Dunia II, telah terjadi hubungan turun naik antara pemerintah dan Al-Ikhwan. Situasi genting yang terjadi di Mesir akibat perang, antara lain pembunuhan terhadap tokoh-tokoh politik (termasuk pembunuhan Perdana Menteri An-Nuqrasyi), membuat keadaan semakin sulit bagi Ikhwan. Tokoh-tokoh Ikhwan ditangkap, aset organisasi disita, dan berbagai media massa mereka diberangus. Kejadian seperti itu terjadi berulang kali. Dari tahun 1940 sampai Desember 1948, pergerakan ini dilarang seutuhnya. Selanjutnya pada

⁶⁴ Mahmud, Ali Abdul Alim, *Metode Pendidikan Ikhwanul Muslimin (terj)*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1997, hlm. 48

malam hari tanggal 12 Februari 1949, Al-Banna ditembak mati oleh orang yang tak dikenal sewaktu ia sedang duduk di mobilnya di depan gedung Syubban Al-Muslimin di Kairo.⁶⁵

Di beberapa negara Arab pada waktu ini, seperti Sudan, Yordania, dan Palestina, kegiatan politis Islam Ikhwan tampak menonjol. Di Sudan, berkat jasa Dr Hasan At-Turabi, idiologi terkenal Ikhwan, beberapa program Islamisasi telah dapat dilaksanakan dalam negara, sekalipun mendapat tekanan yang berat dari negara-negara Barat, dan bahkan Mesir sendiri sebagai negara tetangga dan tanah kelahiran Al-Banna. Di Yordania beberapa wakil Ikhwan dapat duduk dalam parlemen dan beberapa posisi penting dalam pemerintahan. Di Palestina, di balik gerakan Al-Hammas yang menantang negara sekular yang ingin didirikan oleh Arafat juga dikabarkan berdiri aktivis-aktivis Al-Ikhwan.⁶⁶

Pengaruh yang diberikan Ikhwanul Muslimin terhadap Politik Luar Negeri di Mesir mengalami pasang surut hal ini disebabkan oleh sikap yang ditunjukkan oleh setiap pemimpin di Mesir, namun pada intinya mereka tidak setuju atas ideologi yang dibawa oleh gerakan ini, yaitu mendirikan Negara Islam politik. Mengingat di masa yang modern ini tingkat kepentingan pada setiap Negara sudah semakin beragam. Pemerintahan Hosni Mubarak sudah berhasil membuktikan bahwa Mesir adalah Negara yang Demokrasi pada pemilihan umum 2005, dengan

⁶⁵ Loc.cit, Wamy, hal. 10

⁶⁶ Loc.cit, Najiyullah, hlm. 31

menetapkan sistem multipartai termasuk didalamnya Ikhwanul Muslimin, meskipun dinilai masih belum sempurna.

Pada Masa Pemerintahan Hosni Mubarak, yang tidak otoriter membuat Ikhwanul Muslimin dapat beriringan dengan pemerintah dengan membuat kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupan dalam segala bidang masyarakat. Tindakan Mesir dalam menyetujui perdamaian Arab-Israel tidak hanya mendapat kecaman dari dalam negeri namun juga dari luar negeri yang pada waktu itu sekelompok Arab memboikot Negara Mesir. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Hosni Mubarak yang harus memimpin diplomasi. Di satu sisi beliau ingin menghargai komitmen untuk menyelesaikan perdamaian dan disisi lain keputusan dalam mengambil kebijakan akan mendapat hujatan dari Ikhwanul Muslimin dan akan berdampak pada hubungan Arab-Mesir kedepannya.

Perjanjian perdamaian yang telah di bentuk sejak awal tetap dilanjutkan oleh Hosni Mubarak, sehingga ia mengalami masa-masa sulit pada saat itu, hingga beliau harus menanggung beban tanggung jawab atas proses perdamaian hal ini disebabkan tindakan Israel atas tindakan kekerasan dan agresi militer yang dilakukan terhadap palestina.

Disamping itu tujuan utama kedua Politik Luar Negeri setelah mensejahterahkan perekonomian rakyat Mesir adalah mempertahankan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Namun Mesir tidak akan menyerahkan kedaulatannya terhadap setiap keputusan yang diambil. Tetapi opini-opini yang lahir di masyarakat Timur Tengah tidak dapat dihindarkan. Hal ini disinyalir

adanya kepentingan lain di balik kebaikan Amerika Serikat, mengingat isu-isu pembangunan nuklir di Timur Tengah dapat mengancam Amerika. Kecurigaan ini cukup mendasar mengingat hubungan special yang dibangun antara Amerika dan Israel.

Ikhwanul Muslimin yang bergabung dalam perpolitikan di Mesir sangat menghormati kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Hosni Mubarak karena sifatnya tidak melenceng kepentingan masyarakat. Sikap yang diambil oleh Mesir berada dalam lingkup netral tidak memihak dan juga tetap dalam kapasitas kepentingannya. Mengingat kepentingan masyarakat di atas segalanya. Hal inilah yang sedikit menjadi pertimbangan oleh gerakan Ikhwanul Muslimin yang berada di Parlemen agar kegiatan dakwah yang berjalan oleh Ikhwan di luar politik Mesir tetap dapat beriringan dan tidak saling mengganggu.

Masalah sikap politik ikhwan, termasuk yang banyak disorot, sesungguhnya sikap politik yang diambil para *qiyadah* (pemimpin) jama'ah, pada hakikatnya memiliki berbagai misi. Yaitu mengutamakan kemaslahatan, yakni mengikuti kaidah para fuqaha dalam memelihara satu hal yang lebih baik dari dua kebaikan, ketika terjadi kondisi dilematis antara keduanya. Sehingga pada akhirnya ada salah satu kebaikan yang harus dikorbankan. Sebaliknya, menghindari keburukan yang lebih besar bahayanya dari dua keburukan, dengan memilih keburukan yang lebih ringan kadar bahayanya.

Landasan sikap politik yang diambil oleh ikhwan, seperti bekerjasama dengan partai politik, yang memiliki cacat atau melontarkan pujian atas kebaikan

pemerintah yang belum sempurna keislamannya dan semacamnya. Sikap-sikap tersebut merupakan hasil intepretasi dari kaidah tersebut, namun demikian, Ikhwan tidak mengklaim bahwa semua tindakan yang mereka lakukan selalu mengakibatkan mengakibatkan hasil yang positif. Seorang qiyadah pada hakikatnya hanya berijtihad dalam satu masalah, sebagaimana orang lain, yang biasa saja benar atau salah, sesuai kapasitas dan latar belakang pengalaman yang ia miliki.

Yang paling penting semua sikap mereka memiliki landasan perkataan para imam madzhab dan para fuqaha terdahulu. Demikian pula, tak mungkin seorang qiyadah mampu menyingkap kelemahan atau kekurangannya saat melakukan langkah menyeimbangkan antara mashlahat dan mafsadat. Hal ini tentu saja karena dalam melakukan ijtihad dia tak dapat bersandar pada keadaan yang ia sendiri tidak ketahui, atau alasan terselubung dari para musuh dakwah.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari Pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Politik Luar Negeri Mesir banyak dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang berkembang sekitar konflik Arab-Israel. Konflik Arab-Israel dengan masalah Palestina sebagai intinya memang sangat rumit dan tidak jarang membawa akibat timbulnya konflik antara Negara Arab. Kebijakan Politik Luar Negeri Hosni Mubarak telah betul-betul berkembang, setelah menyukseskan perdamaian Arab-Israel, Mesir mulai mengembangkan ke sektor wilayah yang baru, seperti Asia dan Mediterania. Hal ini tidak jauh dari kepentingan akan masyarakat Mesir untuk kemapanan kedepannya. Ikhwanul Muslimin bertindak sebagai gerakan yang berusaha untuk membangun Mesir menjadi Negara yang berlandaskan Islam, dan selalu konsisten terhadap ideologinya sebagai gerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaruh gerakan ini tidak mengubah Mesir seutuhnya sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh gerakan ini. Mesir terbentuk menjadi Negara Demokrasi yang juga menjalin kerjasama dengan Negara barat sesuai dengan kepentingannya. Namun demikian tidak

juga meninggalkan ciri khasnya sebagai Negara Islam. Dan beberapa norma-norma yang berlaku di Negara ini masih terdapat nilai-nilai Islam didalamnya.

2. Penguasa Mesir senantiasa memburu dan mencoba membumi hanguskan gerakan-gerakan Islam radikal yang dituduh akan menggulingkan pemerintah yang sah. Pada masa pemerintahan Hosni Mubarak, perlawanan Islam radikal yang paling keras terhadap pemerintah berasal dari Jamaah Islamiyah dan Jamaah al-Jihad, yang telah menyatakan perang sampai mati terhadap pasukan keamanan dan polisi. Pemerintah Mubarak telah menanggapi secara agresif ancaman serius radikalisme Islam terhadap stabilitas pemerintah dan keamanan regional. Walaupun dalam prakteknya sering tidak jelas garis pemisah antara gerakan Islam radikal dan moderat, antara keamanan negara dan batas-batas otoritas negara, antara hukuman atau kejahatan dan hak-hak asasi manusia. Dalam perangnya melawan "terorisme", tindakan tegas pemerintah dan penahanan massal terhadap para tokoh ekstremis dan simpatisannya mencakup juga tokoh-tokoh moderat beserta para anggota keluarganya, dalam rangka membungkam dan manakut-nakuti oposisi. Namun Hubungan baik terjalin antara Pemerintah Mesir dengan Ikhwanul Muslimin mengalami pasang surut, pada setiap pergantian pemimpinnya. Ada yang menolak keras dan adapula yang berusaha



merangkul untuk membangun Perpolitikan Mesir. Hal ini menjadikan pemerintah berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, mengingat gerakan ini berusaha turut ambil bagian dalam kegiatan politik di Mesir.

3. Kegagalan Gerakan Islam politik di Mesir diakibatkan oleh beberapa hal:

1. Mengakarnya ideologi nasionalis-sekuler dalam kehidupan para elit politik negara-negara Muslim. Hal ini karena kesengajaan pihak kolonial waktu itu yang ingin menancapkan pengaruh kolonialismenya dengan menanamkan tradisi sekuler di negara-negara Muslim jajahannya, tak terkecuali di Mesir. Tidak siapnya gerakan Islam politik dengan pemikiran alternatif tentang politik Islam yang sesuai dengan semangat pembaharuan, kebanyakan gerakan Islam politik masih mengusung konsep politik Islam lama yang dalam banyak hal sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pada prinsipnya gerakan Islam politik mengusung pemikiran politik yang berbasis syari'at Islam, sementara kelompok sekuler pemikiran politiknya berbasis sekularisme barat. Dalam banyak sisi pemikiran kaum sekular lebih matang secara konsepsional (karena sudah lama digagas dan diterapkan sebagai

sistem politik di Barat) jika harus dihadapkan dengan pemikiran politik kaum Islamis.

2. Islam politik gagal juga karena tidak adanya sinergitas antar gerakan Islam, dan justru yang nampak adalah saling menafikan satu sama lain, karena masing-masing mengusung kepentingan yang berlainan. Terdapat polarisasi yang cukup tajam antar gerakan Islam; satu sisi ada yang menginginkan perubahan secara radikal atas fenomena sosial-politik dalam negara Muslim, tetapi di sisi lain memilih jalan kompromistis dengan kekuasaan dengan harapan ada kesempatan untuk melaksanakan perubahan secara evolutif-transformatif.
3. Akibat campur tangan pihak asing yang tidak menghendaki tampilnya Islam politik dalam panggung politik di negara-negara Muslim menjadi faktor penyebab gagalnya Islam politik juga. Kebanyakan mereka keberatan karena tidak ingin kepentingannya di negara-negara Muslim diganggu dengan munculnya kelompok Islam politik, karena orientasi kelompok Islam politik adalah anti imperialisme dan kapitalisme Barat, dan hal ini sangat jelas akan mengganggu agenda mereka di kawasan Timur Tengah

B. Saran - saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dengan melihat realitas tentang pengaruh gerakan Ikhwanul Muslimin, maka penulis membuat beberapa catatan untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat politik luar negeri Mesir pada masa kebangkitan gerakan Ikhwanul Muslimin.

1. Perlu adanya konsistensi dalam menentukan Politik Luar Negeri di Mesir, dimana tidak dipengaruhi oleh pihak manapun sehingga Mesir dapat menentukan arah kebijakannya dan secara tegas menetapkan prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan. Begitupun pihak-pihak tertentu baik individu ataupun yang mengatas namakan entitas Negara dimana dalam hal ini Amerika disebut-sebut sebagai pihak yang memiliki pengaruh sangat besar, sebaiknya tidak secara penuh dapat mempengaruhi apalagi mendikte dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri di Mesir.
2. Munculnya gerakan Ikhwanul Muslimin disebabkan oleh kekecawaan terhadap pemimpin-pemimpin Mesir yang dianggap telah membawa Mesir menjadi Negara yang telah meninggalkan nilai-nilai islam dan mudah dimasuki oleh pengaruh barat, dan itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dari gerakan ini. Gerakan ini sebenarnya sangat jauh dari kekerasan namun dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah. Jadi perlu

adanya koordinasi dengan pemerintah agar dapat tercipta perdamaian diantara keduanya.

3. Sebaiknya Pemerintah dan gerakan-gerakan islam yang dianggap radikal dan dapat mengancam stabilitas ataupun keamanan Negara diharapkan adanya negosiasi diantara kedua pihak sehingga tidak ada lagi yang dapat mengancam stabilitas Negara utamanya pemimpin yang merasa tidak aman, melihat pemimpin-pemimpin terdahulu banyak yang dibunuh.
4. Perlu adanya dukungan langsung dari Pemerintah terhadap gerakan islam politik mengingat gerakan ini muncul karena latar belakang Mesir sebagai Negara Islam, dan Pemerintah juga dapat mengambil kebijakan yang dapat memenuhi ideology keduanya sehingga diantara mereka dapat berjalan sinergis yaitu memajukan Negara di dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asmuni, Yusran, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Clymer, Carlton Rodee, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993
- Colombus & Wolfo, *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*, Bandung: CV. Abardin, 1990
- Dwiyana, Sihombing, *Buku Pintar Politikus Dunia; Anwar Sadat melangkah di antara jalan yang logis dan tidak logis*, Jakarta: Dela Pratasa, 2000
- Ikbar, Yanuar, *Ekonomi Politik Internasional I, Konsep dan Teori*, Bandung: Rafiah Aditama, 2006
- Jainuri, Achmad, *Orientasi Ideologi Gerakan Islam, (Konservatisme, Fundamentalisme, Sekularisme, dan Modernisme)*, Surabaya: Lembaga Pekerjaan Agama dan Masyarakat (LPAM), 2004
- Jamila, Maryam, *Para Mujahid Agung* (terj), Bandung: Mizan, 1989
- Mahmud, Ali Abdul Alim, *Metode Pendidikan Ikhwanul Muslimin* (terj), Jakarta: Gema Insani Pers, 1997
- Mohammad, Syed, *Moralitas Politik Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003
- Najiyullah, A, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran; Akar Ideologis dan Penyebarannya* (terj), Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 2002
- Nasution, Dahlan, *Politik Internasional : Konsep dan Teori*, Jakarta: Erlangga, 1989
- Osman, Fathi, *Ikhwan dan Democracy. Ikhwanul Muslimin Membedah Demokrasi*, Yogyakarta: Titian Wacana, 2005
- Pamudji, S, *Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yayan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005

- Rais, Amien, *Politik dan Pemerintahan Timur Tengah*, Yogyakarta: PAU-SS UGM, 1988
- Saifuddin, Achmad Fedyani, *Konflik Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, Jakarta: CV.Rajawali, 1986
- Sihbudi, Riza, dan M. Hamdan Basjar, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, Bandung: PT. Eresco, 1993
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara (Sejarah dan Pemikiran)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990
- Tajib, Anshori, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983
- Vaezi, Ahmed, *Agama Politik Nalar Politik Islam*, Jakarta: Citra, 2006

Majalah :

- Mengawal Demokrasi atau Penyelamat Kekuasaan*, Majalah Suara Ummah, Edisi 22 Februari 2007
- Sutrisno, Mau Kemana Demokrasi?*, Majalah Suara Ummah, Edisi 22 Februari 2007

Surat Kabar :

- Dua Abad Islam Liberal*, Harian Kompas, edisi 02 Maret 2007
- Geliat Reformasi dan Peta Kekuatan Politik di Mesir*, Harian Kompas, 29 September 2007
- Musthafa Abd Rahman, Masa Depan Demokrasi di Mesir*, Harian Kompas, 30 September 2007

Internet:

- Egypt Foreign Policy*,
http://www.photius.com/countries/egypt/government/egypt_government_foreign_policy.html, diakses tanggal 3 Maret 2008

Egypt Diplomacy, <http://vitasnyamesir.wordpress.com/weekly-news/> diakses tanggal 04 Maret 2008

Foreign Relations of Egypt, <http://en.wikipedia.org/wiki/foreign-relation-of-egypt>, diakses 3 Maret 2008

Gerakan Dakwah Islam Ikhwanul Muslimin,
<http://www.alislam.or.id/organisasi/arsip/00000001.html>, diakses tanggal 28 Mei 2008

Gerakan Ikhwan al-Muslimin,
<http://www.forum.ekpkm.com/viewtopic.php?f:96&t=1073&start=0&st=0&sk=t&sd=fdad6faae32b44c3a62242ee0fdes468>, diakses tanggal 28 Mei 2008

Hanggarini, Peni, *58 Tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa*,
<http://www.alumni.adsjakarta.or.id/articleattachment/articlepenihanggarini05.htm>, diakses tanggal 28 Mei 2008

Ideologi Mesir, <http://vitasnyamesir.wordpress.com/ideologi-mesir/>, diakses tanggal 28 Mei 2008

Ikhwanul Muslimin Keras Sikap Pemerintah Mesir,
http://www.indonesian.tribe.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=2083&Itemid=26, diakses tanggal 3 April 2008

Ikhwanul Muslimin: Kekuatan Islam di Mesir,
<http://www.kammi-unida.blogspot.com/2008/04/ikhwanul-muslimin-kekuatan-islam-di.html>, diakses tanggal 22 April 2008

Interaksi Internasional Mesir,
<http://id.wordpress.com/tag/interaksi-internasional-mesir/>, diakses tanggal 28 Mei 2008

Osama al-Ghazali Harb, *Egypt's Foreign Policy in Mubarak's Fourth Term*,
[http://www.hsje.org/egypt's foreign policy in mubarak's fourth term](http://www.hsje.org/egypt's%20foreign%20policy%20in%20mubarak's%20fourth%20term), diakses tanggal 3 Maret 2008

Pemerintah Mesir Vs Al-Ikhwan: Terkait dengan Detik-Detik Suksesi?,
<http://gemapembebasan-unm.blogspot.com/2007/09/pemerintah-mesir-vs-al-ikhwan-terkait.html>, diakses tanggal 3 September 2007



Politik Luar Negeri Mesir,

<http://www.chebonk.blogspot.com/2007/11/politik-luar-negeri-mesir.html>,
diakses tanggal 28 Mei 2008

Potensi Mesir terlibat konflik kawasan,

<http://vitasymesir.wordpress.com/2008/05/27/potensi-mesir-terlibat-konflik-kawasan/>, diakses tanggal 27 Mei 2008

Sejarah Perang Mesir, <http://vitasymesir.wordpress.com/category/sejarah-c/sejarah-perang-mesir/>, diakses tanggal 27 Mei 2008

Wahyuddin, Imam, *Kebangkitan Ikhwan Muslimin dan Nasib Reformasi Mesir,*
<http://www.mail-archive.com/kebangkitan-ikhwan-dan-nasib-reformasi-mesir@yahoogroups.com/index.html>, diakses tanggal 28 Mei 2008